

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Rahmad No. 1 Komplek PIK Menteng Medan - 20228
Telp : 061 - 7882200, Fax : 061 - 7850800
Email : bpbdd_kotamedan@yahoo.com Website : bpbdd.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 000.7.2.2 / 1039

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN 2021 – 2026

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Tahun Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2022, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 – 2026. |
| PERTAMA | : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026. |
| KEDUA | : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang telah ditetapkan. |
| KETIGA | : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. |

- KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : M e d a n
Pada Tanggal : 1 April 2023

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN



MUHAMMAD HUSNI, SE, M.Si
DEMIANA STAMA MUDA
NP. 0680705 199503 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 000.7.2.2 / 1139
TANGGAL : 1 April 2023
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN 2021 – 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN 2021 – 2026**

Penanggung Jawab : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan
Ketua Tim : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

Pelaksana :

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Ketua Tim Lingkup Penyusunan Program
5. Ketua Tim Lingkup Keuangan
6. Ketua Tim Lingkup Pencegahan
7. Ketua Tim Lingkup Kesiapsiagaan
8. Ketua Tim Lingkup Kedaruratan
9. Ketua Tim Lingkup Logistik
10. Ketua Tim Lingkup Rehabilitasi
11. Ketua Tim Lingkup Rekonstruksi
12. Pelaksana di Lingkup Penyusunan Program

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN**



MUHAMMAD HUSNI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640705 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 ini membahas tentang gambaran umum beban tugas, uraian, tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, analisa lingkungan strategis, visi, misi, tujuan strategis dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, program dan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi Renstra.

Perubahan Renstra ini diharapkan sebagai pedoman pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan koordinasi, fasilitasi maupun upaya-upaya dalam mengantisipasi sebelum, saat, sesudah terjadinya bencana di Kota Medan.

Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya dalam proses pembangunan Kota Medan menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius.

Medan, 20 Desember 2023

KEPALA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN

MUHAMMAD HUSNI, SE.M.SI
Pemula Utama Muda
NIP. 19630705 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	60
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	64
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	64
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	65
3.3. Telaahan Renstra K/L	71
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	77
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	82
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	83
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	83
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	87
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	91
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	154
BAB VIII PENUTUP	155

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PHL Menurut Pendidikan, jabatan dan golongan	18
Tabel 2.2 Peralatan Penanggulangan Bencana	19
Tabel 2.3 Kejadian Bencana Tahun 2018 - 2022	23
Tabel 2.4 Rekapitulasi Data Kerugian Kebencanaan BPBD Tahun 2018 – 2022	24
Tabel 2.5 Jumlah Korban Bencana di Kota Medan Tahun 2018 - 2022 ...	24
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Tahun 2018 – 2022	26
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Sebelum Perubahan 2016 – 2020	29
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Sesudah Perubahan 2021 – 2026	48
Tabel 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	69
Tabel 3.2 Telaahan Renstra BNPB, BPBD Sumatera Utara dan BPBD Kota Medan	73
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kota Medan Sebelum Perubahan 2021 - 2026 ...	84
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kota Medan Sesudah Perubahan 2021 - 2026 ...	85
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan	89
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan 2021-2026	92
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan 2021-2026	117
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	1
Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L,	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD	17
Gambar 2.2 Grafik Kejadian Tahun 2018 - 2022 Daerah Kota Medan	23
Gambar 2.3 Laporan Gugus Tugas COVID-19	25
Gambar 3.1 Peta Risiko Banjir Kota Medan	79

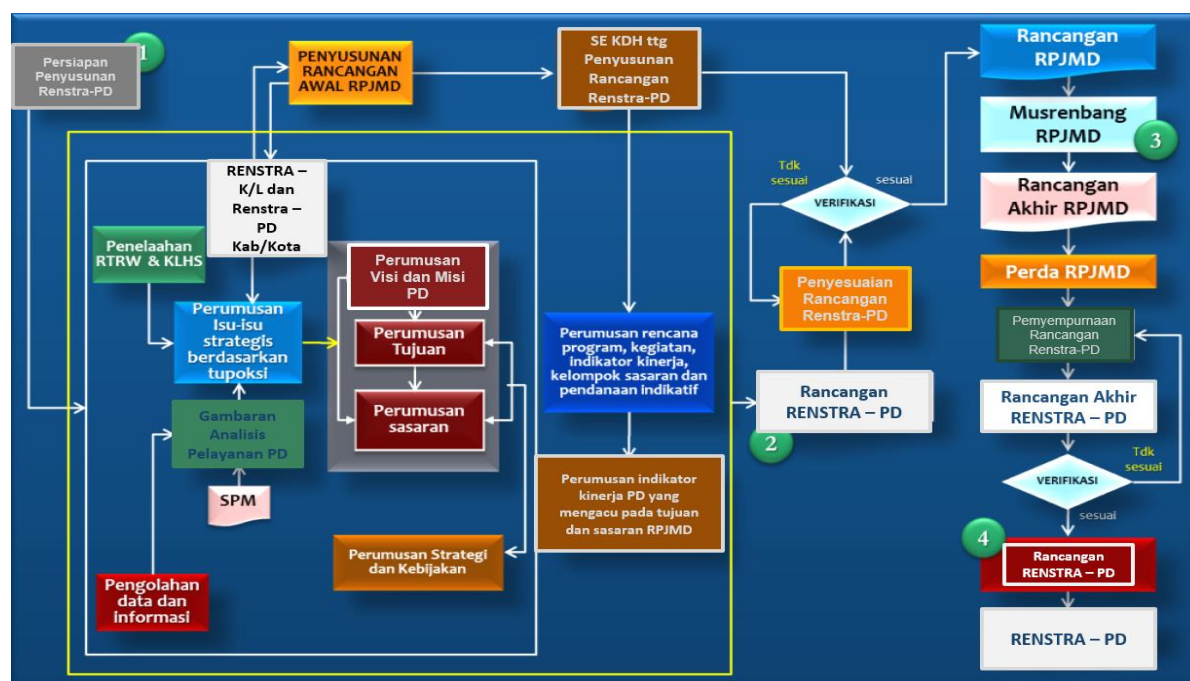
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

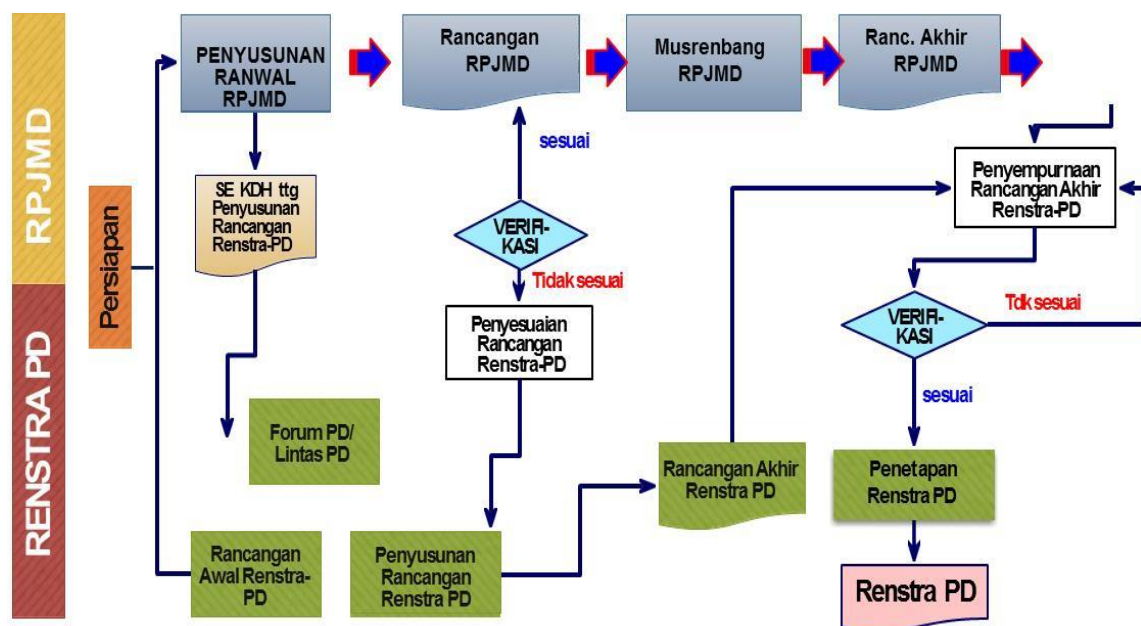
Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Tata cara penyusunan renstra perangkat daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ditetapkan bahwa Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah *(Sumber: PPKK Fisipol UGM)*

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah

(Sumber: PPKK Fisipol UGM)

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 201, Pemerintah Kota Medan telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD serta adanya ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Adapun substansi dari Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan serta sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerja-nya, serta indikator kinerja program. Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, diharapkan akan terwujud sinergi antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan Kota dengan Provinsi dan Pusat, serta diharapkan akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perubahan RPJMD Kota Medan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra BPBD Kota Medan. Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang telah disusun. Perubahan Renstra dilaksanakan penyesuaian seperlunya dengan perubahan RPJMD Kota Medan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359: Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem-

- baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19).
 11. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

12. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19)
13. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 (9/2000) Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di daerah Dalam Pembangunan Nasional
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Desease 19* (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease 19* (Covid-19)
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang RPJMD Perubahan;
25. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Medan.
26. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan
27. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil BPBD Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang penanganan kebencanaan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya.
- c. Menjadi kerangka dasar bagi BPBD Kota Medan dalam upaya meningkatkan kualitas penanganan kebencanaan di Kota Medan
- d. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra BPBD Kota Medan tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.
- e. Untuk lebih memantapkan landasan kebijakan pembangunan kota dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Walikota Medan.

Penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan bencana di wilayah Kota Medan.
3. Mendorong peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas.
5. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana.

6. Mengembangkan penelitian sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan memuat pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan fungsional/non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan. Kepala Badan dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sehari-hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; dan
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

1. Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah

- a) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Unsur Pelaksana;
- b) Dalam melaksanakan tugas pokok, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi pengarahan dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah tanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Badan;
- c. Pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
- d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Bi-

dang Pencegahan dan Kesiapsiagaan prabencana serta memberdayakan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Penyusunan peyunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
- d. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi;
- g. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing seksi di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik;
- c. Melakukan dan mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik;
- f. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat Pasca Bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;

- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam hal pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil masing-masing Seksi di lingkungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja badan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan ini dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Secara umum, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam tahap implementasi pelaksanaan akan dikelola oleh seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sebagai berikut:

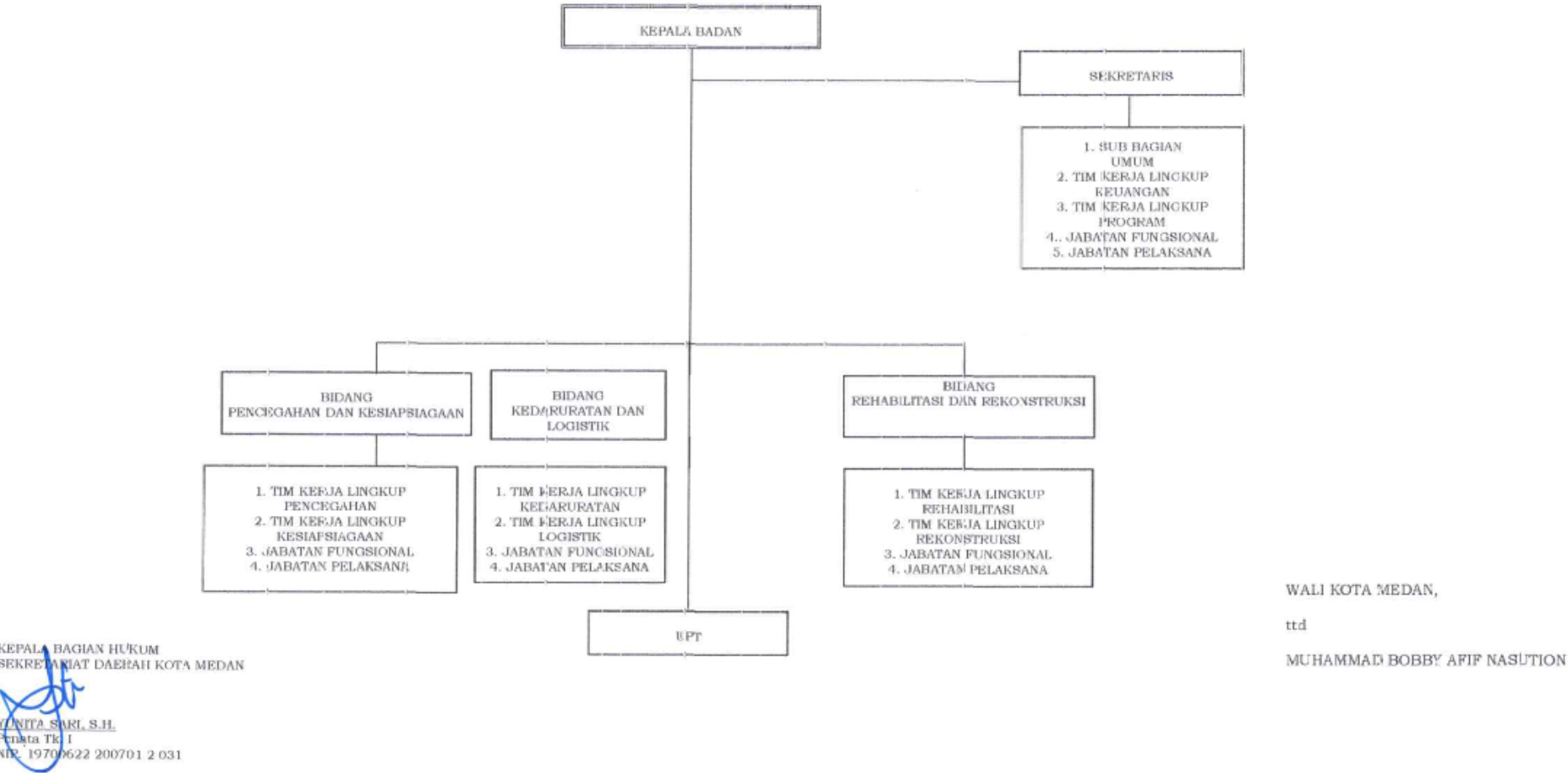
- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretaris, membawahkan
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana
- 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - 1) Tim Kerja Lingkup Pencegahan;

- 2) Tim Kerja Lingkup Kesiapsiagaan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
- 1) Tim Kerja Lingkup Kedaruratan;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Logistik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
- 1) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Rekonstruksi;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana
- 6) UPT

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Medan terlampir pada **Lampiran 1.**

LAMPIRAN XXIX PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR : 97
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI
BAGIAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kota Medan pada tahun 2023 didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 122 personil yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 37 orang (30%) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) 85 orang (70%). Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PHL Menurut Pendidikan, jabatan dan golongan

No	Pendidikan / Jabatan / Go- longan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Menurut Pendidikan		34		32		37	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-
3	SLTA/Sederajat	2	1	1	1	1	-
4	Diploma I-IV	-	-	-	-	-	-
5	Strata-1	10	7	9	6	9	7
6	Strata-2	13	1	13	2	17	3
7	Strata-3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		25	9	23	9	27	10
Menurut Jabatan		34		32		37	
1	Eselon II (1 orang)	1	-	1	-	1	-
2	Eselon III (4 orang)	4	-	4	-	4	-
3	Eselon IV (9 orang)	6	3	-	1	-	1
4	Fungsional	-	-	5	2	6	2
5	Staf	14	6	13	6	16	7
6	PHL	55	10	53	12	72	13
Jumlah		80	19	76	21	99	23
Menurut Golongan		34		32		37	
1	II/a	-	-	-	-	-	-
2	II/b	-	-	-	-	-	-
3	II/c	-	1	-	1	-	-
4	II/d	2	-	1	-	1	-
5	III/a	-	3	-	1	-	2
6	III/b	2	-	2	1	-	1

7	III/c	3	-	3	-	4	1
8	III/d	9	4	8	4	9	3
9	IV/a	4	1	4	1	7	2
10	IV/b	4	-	4	1	4	1
11	IV/c	1	-	1	-	2	-
Jumlah		25	9	23	9	27	10

Sumber Data: BPBD Kota Medan, 2023

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah PNS dibandingkan dengan seluruh pegawai di BPBD Kota Medan hanya sebesar 30% dari sejumlah 122 orang pegawai yang ada. Kekurangan pegawai yang terjadi selama ini di tutup dengan menggunakan tenaga bantu yaitu Pegawai harian lepas (PHL). Sedangkan apabila dilihat dari sisi gender, jumlah pegawai pada BPBD Kota Medan 81% (99 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 19% (23 orang) berjenis kelamin perempuan.

Walaupun secara keseluruhan, dukungan perlengkapan kerja kantor semakin memadai, namun untuk mendorong implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana yang semakin handal tetap dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan kerja yang ada. Dalam hal sumber daya peralatan di lapangan, BPBD Kota Medan memiliki:

Tabel 2.2 Peralatan Penanggulangan Bencana

No	Nama Peralatan Kebencanaan	Asal Perolehan	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi
1	Perahu Karet Kap.8 orang	Dinas Sosial	5 unit	2013	Rusak Berat
2	Mesin Perahu Karet 30 PK	Dinas Sosial	2 unit	2013	Baik
3	Tenda Pleton	Dinas Sosial	3 unit	2013	Rusak Berat
4	Perahu Karet Kap. 10 orang	BNPB	1 unit	2013	Rusak Ringan
5	Mesin Perahu Karet 25 PK	BNPB	1 unit	2013	Baik
6	Tenda Posko	BNPB	1 unit	2013	Baik
7	Tenda Pengungsi	BNPB	3 unit	2013	Baik
8	Tenda Keluarga	BNPB	24 unit	2013	24 Rusak Berat
9	Velbed	BNPB	25 buah	2013	25 Rusak Berat
10	Lampu Penerangan (Solar Cell)	BNPB	5 buah	2013	Rusak Berat
11	Solar Handle Lamp	BNPB	12 buah	2013	Rusak Berat
12	Lampu Senter HID Search Light	BNPB	1 buah	2013	Rusak

					Berat
13	Genset 10 KVA	BNPB	1 unit	2013	Baik
14	HT	BNPB	2 unit	2013	Baik
15	RIG	BNPB	1 unit	2013	Baik
16	SSB	BNPB	1 unit	2013	Baik
17	Mobil Rescue Double Cabin 4 Wd	BNPB	1 unit	2013	Kurang Baik
18	Motor Trail	BNPB	2 unit	2013	Baik
19	Perahu Polyethylene (Per Set)	BNPB	2 unit	2013	Baik
20	Mesin Perahu Karet Kap. 9,8 PK	BNPB	2 unit	2013	Baik
21	Pompa Air	BNPB	2 unit	2014	Baik
22	Tenda Bencana	APBD	3 unit	2014	Baik
23	Trolley Hidrolik	APBD	1 unit	2014	Baik
24	Chainsaw	APBD	1 unit	2014	Baik
25	Senter	APBD	10 unit	2014	Baik
26	Senter Kepala	APBD	5 unit	2014	Kurang Baik
27	Mesin Pompa Blower	APBD	2 unit	2014	Baik
28	Lampu Penerangan/Emergency	APBD	10 unit	2014	Baik
29	HT	APBD	10 unit	2014	Kurang Baik
30	Camera Digital	APBD	1 unit	2014	Rusak Sedang
31	Handycam	APBD	1 unit	2014	Rusak Sedang
32	Laptop/Notebook	BNPB	1 unit	2015	Rusak Berat
33	Printer Portable	BNPB	1 unit	2015	Kurang Baik
34	Hardisk External Portable	BNPB	1 unit	2015	Baik
35	Camera Digital	BNPB	1 unit	2015	Rusak Berat
36	Handycam	BNPB	1 unit	2015	Baik
37	Telepon Satelit	BNPB	1 unit	2015	Baik
38	GPS	BNPB	1 unit	2015	Baik
39	HT	BNPB	1 unit	2015	Rusak Berat
40	Desktop PC	BNPB	1 unit	2015	Baik
41	Printer	BNPB	1 unit	2015	Kurang Baik
42	Radio Komunikasi All Band	BNPB	1 unit	2015	Baik
43	Modem Internet External	BNPB	1 unit	2015	Baik
44	SSB	BNPB	1 unit	2015	Baik
45	Projector	BNPB	1 unit	2015	Baik
46	UPS	BNPB	1 unit	2015	Baik
47	a. Tenda Posko Peti I b. Tenda Posko Peti II c. Alas Tenda @ 72 lembar d. Multi Purpose Solar Cell @ 4 unit	BNPB	1 peti 1 peti 1 coly 4 unit	2015	Rusak Sedang
48	a. Tenda Pengungsi Peti I b. Tenda Pengungsi Peti II c. Alas Tenda @ 72 lembar d. Multi Purpose Solar Cell @ 4	BNPB	1 peti 1 peti 1 coly 4 unit	2015	Rusak Sedang

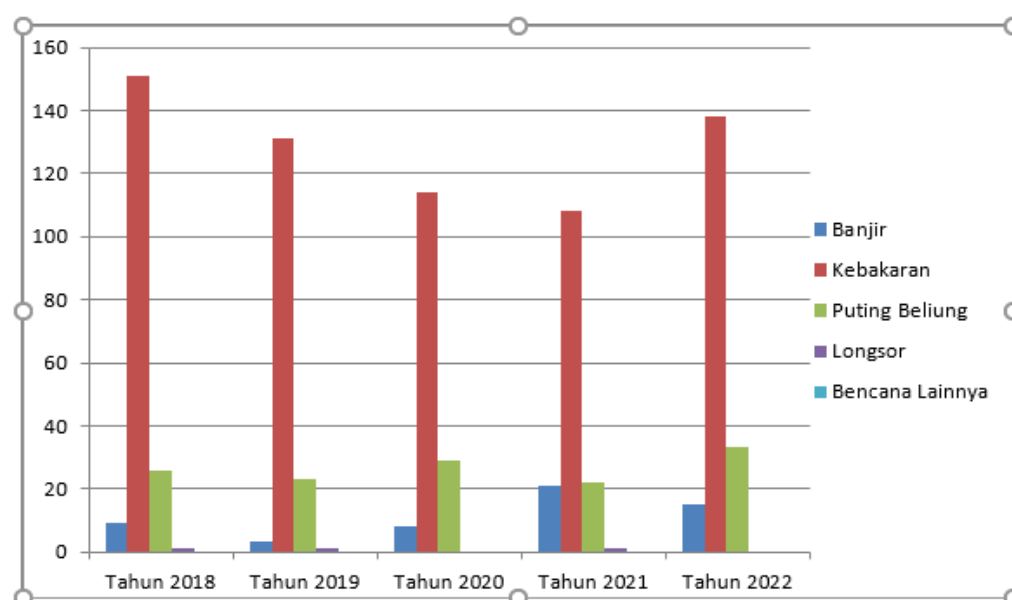
	unit				
49	a. Tenda Keluarga b. Alas Tenda Keluarga c. Multi Purpose Solar Cell	BNPB	5 peti 5 ball 5 unit	2015	Rusak Sedang
50	a. Perahu Karet Kap. 8 org b. Dek Perahu Karet Kap. 8 org	BNPB	1 unit 1 unit	2015	Kurang Baik
51	a. Perahu Karet Kap. 6 org b. Dek Perahu Karet Kap. 6 org	BNPB	1 unit 1 unit	2015	Kurang Baik
52	Motor Trail	BNPB	2 unit	2015	Baik
53	Tower Komunikasi	APBD	1 set	2015	Baik
54	Tabung Pemadam Kebakaran	APBD	10 unit	2015	Baik
55	Tandu Keselamatan	APBD	4 unit	2015	Baik
56	Wireless TOA	APBD	1 unit	2015	Baik
57	Compressor	APBD	1 Set	2016	Baik
58	Mesin Pompa Otomatis	APBD	1 Unit	2016	Baik
59	Mesin Bor Beton	APBD	1 Buah	2016	Baik
60	Tandu air	APBD	2 Buah	2016	Baik
61	Tandu	APBD	2 Buah	2016	Baik
62	Gerinda	APBD	1 Buah	2016	Baik
63	Las Listrik/Trapo	APBD	1 Buah	2016	Baik
64	Mesin Pemotong Besi	APBD	1 Buah	2016	Baik
65	Dongrak Mobil Hidrolic	APBD	2 Buah	2016	Baik
66	Bor Listrik	APBD	1 Set	2016	Baik
67	Kunci	APBD	1 Set	2016	Baik
68	Chainsaw	APBD	2 Buah	2016	Baik
69	Pully Fixe	APBD	5 Buah	2016	Baik
70	Pully Tandem Red	APBD	2 Buah	2016	Baik
71	Seat Hames	APBD	5 Buah	2016	Baik
72	Full Body Hames	APBD	2 Buah	2016	Baik
73	Lift Ascender/Jumar	APBD	4 Buah	2016	Baik
74	Descender	APBD	2 Buah	2016	Baik
75	Basic Ascender	APBD	2 Buah	2016	Baik
76	Auto Stop	APBD	2 Buah	2016	Baik
77	Carmantel Dynamic	APBD	1 Buah	2016	Baik
78	Prusic	APBD	1 Buah	2016	Baik
79	Webing	APBD	1 Buah	2016	Baik
80	Boot Safety	APBD	20 Buah	2016	Baik
81	Ransel Dry Bag	APBD	2 Buah	2016	Baik
82	Helm Kenderaan TRC	APBD	25 Buah	2016	Baik
83	Knipet/Pelindung Lutut dan Siku	APBD	10 Buah	2016	Baik
84	Tenda Dapur Bencana	APBD	4 Buah	2016	Baik
85	HT	APBD	7 unit	2016	Baik
86	RIG	APBD	1 unit	2016	Baik
87	SSB	APBD	1 unit	2016	Baik
88	Tenda Pengungsi	BNPB	14 Unit	2017	Baik
89	Light Tower Portable	BNPB	1 Unit	2017	Baik
90	Genset 5 KVA	BNPB	2 Unit	2017	Baik
91	Genset 1000 W	BNPB	7 Unit	2017	Baik
92	Perlengkapan Evakuasi Korban	APBD	6 set	2017	Baik
93	Tandu	APBD	2 buah	2017	Baik

94	Baju, Celana, Helmet Tahan Api	APBD	6 set	2017	Baik
95	Firemen Bout	APBD	6 pasang	2017	Baik
96	Motor Trail	Pemko Medan	6 unit	2018	Kurang Baik
97	Mobil Pick Up	Pemko Medan	1 unit	2018	Baik
98	Mobil Pick Up	BNPB	1 unit	2018	Baik
99	Drone	APBD	1 unit	2018	Baik
100	HT	APBD	5 unit	2018	
101	Gandengan Perahu	APBD	2 unit	2018	Baik
102	Chain Saw	APBD	1 unit	2018	Baik
103	Lampu Sorot Portable	APBD	2 unit	2019	Baik
104	Velbed Lipat Portable	APBD	11 buah	2019	Baik
105	RIG	APBD	1 unit	2019	Baik
106	Gadget Portable	APBD	2 unit	2019	Baik
107	Camera Mirrorless	APBD	1 unit	2019	Baik
108	Senter Kepala Standar	APBD	5 buah	2019	Baik
109	Mesin Bor	APBD	1 unit	2019	Baik
110	Helm Speleo	APBD	10 buah	2019	Baik
111	HT	APBD	10 unit	2019	Baik
112	HT	Kominfo	20 unit	2019	Baik
113	Perahu Karet	APBD	5 unit	2020	Baik
114	Tenda Pleton	APBD	2 unit	2020	Baik
115	Tenda Posko	APBD	2 unit	2020	Baik
116	Perahu Karet	APBD	5 unit	2021	Baik
117	Mesin Perahu Karet 25 PK	BNPB	2 unit	2021	Baik
118	Chain Saw	APBD	3 unit	2021	Baik
119	Portabel Water Pump	APBD	3 unit	2022	Baik
120	Velbed	APBD	50 unit	2022	Baik
121	Life Jacket	APBD	23 unit	2022	Baik
122	Full Body Harness	APBD	3 unit	2022	Baik
123	Seat Harness	APBD	3 unit	2022	Baik
124	Descender	APBD	1 unit	2022	Baik
125	Figure of Eight	APBD	3 unit	2022	Baik
126	Tandu Lipat GEA	APBD	1 unit	2022	Baik
127	Mobil Ambulance	APBD	1 unit	2022	Baik
128	Sepeda Motor Trail	APBD	5 unit	2022	Baik
129	Outboat Motor/Mesin Tempel	APBD	2 unit	2022	Baik
130	Perahu Karet	APBD	5 unit	2022	Baik
131	Perkakas Mekanik Krisbow	APBD	2 unit	2022	Baik
132	Drone Mavic	APBD	2 unit	2022	Baik
133	HT	APBD	20 unit	2022	Baik
134	RIG	APBD	5 unit	2022	Baik
135	Helmet	APBD	38 unit	2022	Baik
136	Dayung	APBD	12 unit	2022	Baik
137	Kendaraan Khusus (Triton)	Hibah BNPB	1 unit	2022	Baik
138	Kendaraan Khusus (Ford Ranger)	APBD	1 unit	2022	Baik

Berdasarkan data ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi BPBD diatas, maka BPBD masih sangat memerlukan adanya gudang logistik yang representatif dan memadai untuk menampung banyaknya jenis barang barang logistik dan peralatan yang ada, termasuk rak penyimpanan logistik tersebut.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) intensitas kejadian bencana cenderung terus mengalami peningkatan. Kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi (akibat perubahan iklim global dan degradasi lingkungan) dimana bencana banjir, puting beliung, longsor, kekeringan masih yang paling banyak terjadi. Banjir dan kebakaran merupakan kejadian bencana yang paling sering terjadi di Kota Medan, dimana semakin meningkat setiap tahunnya.



Gambar 2.2 Grafik Kejadian Tahun 2018-2022 Daerah Kota Medan

Tabel 2.3. Kejadian bencana Tahun 2018 - 2022 Daerah Kota Medan

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banjir	9	3	32	22	15
2	Kebakaran	151	131	219	108	212
3	Angin Putting Beliung	26	23	29	22	33
4	Longsor	1	1	0	1	1
5	Bencana Lainnya	0	0	0	0	0
Total		187	158	280	153	261

Sedangkan kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian bencana tersebut adalah sebagai berikut,

Tabel. 2.4 Rekapitulasi Data Kerugian Kebencanaan BPBD Kota Medan Tahun 2018 - 2022

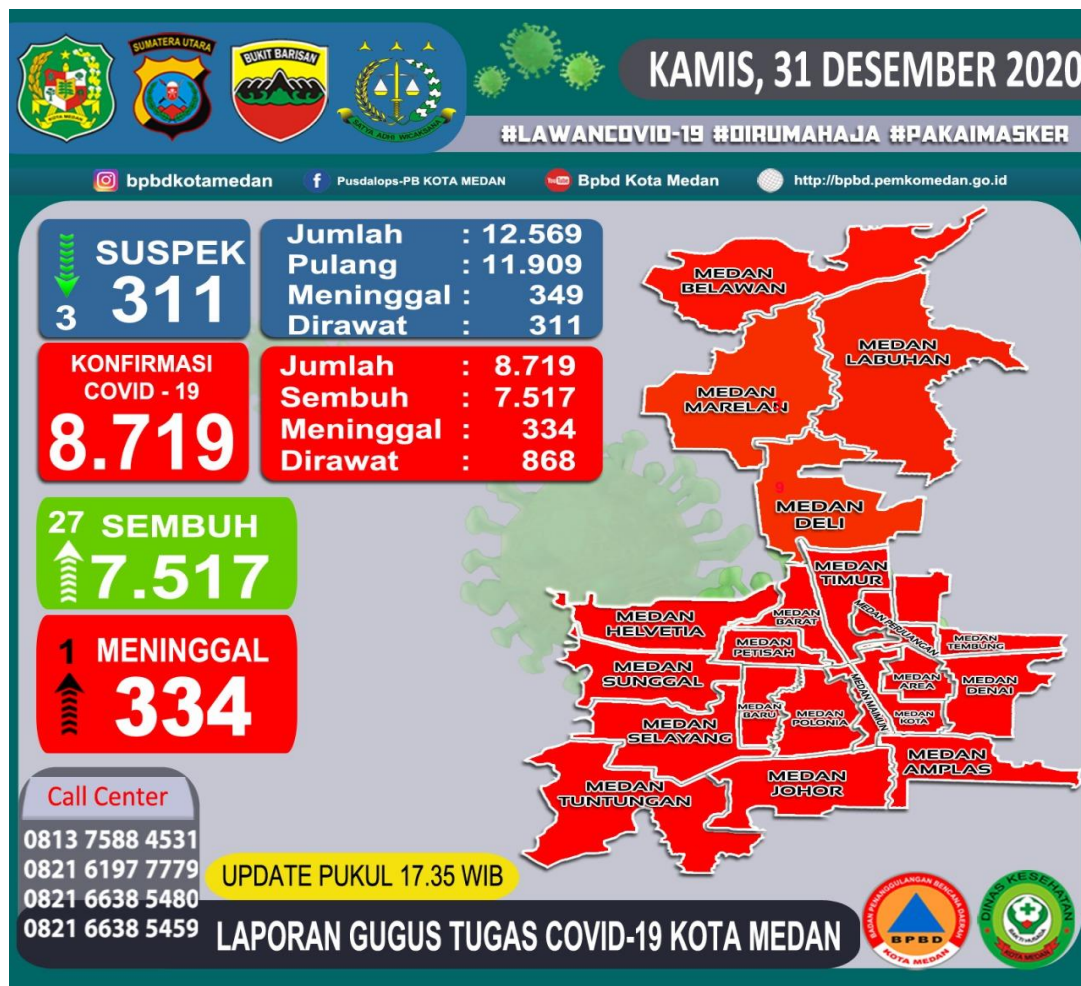
N O	TAHUN	KEBAKARAN	BANJIR	PUTING BELIUNG	LONGSOR	BENCANA LAINNYA	TOTAL KERUGIAN PER-TAHUN
1	TAHUN 2018	13.284.300.000	2.300.000.000	214.000.000	80.000.000	-	15.878.300.000
2	TAHUN 2019	14.450.300.000	950.000.000	2.305.000.000	100.000.000	-	17.805.300.000
3	TAHUN 2020	8.023.000.000	6.300.000.000	903.000.000	-	-	15.226.000.000
4	TAHUN 2021	11.791.500.000	2.405.000.000	2.405.000.000	-	-	16.601.500.000
5	TAHUN 2022	26.484.000.000	3.551.000.000	95.000.000		-	30.130.000.000
JUMLAH		74.033.100.000	15.506.000.000	5.922.000.000	180.000.000	-	95.641.100.000

Tabel. 2.5 Jumlah Korban Bencana Di Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Ta- hun	Kondisi Korban			Jumlah Korban Bencana (Jiwa)	Jumlah Bangunan Rusak					
	Mening- gal	Lu- ka	Hilan g		Ge- dung	Rumah Per- manen	Semi per- manen	Jembat- an	La- han	Jala n
2018	1	6	0	3456	0	1352	0	0	0	0
2019	1	3	0	7117	2	1455	677	0	0	0
2020	0	19	0	75396	0	12244	0	0	0	4
2021	2	22	0	37488	0	14350	620	0	0	0
2022	10	10	0	53451	0	10090	2293	0	0	0

Pada tahun 2020 Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah di Indonesia atau bahkan meluasnya KLB/Wabah antar negara yang dikenal dengan pandemi. Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah merupakan bencana nonalam. Sejak November 2019 telah merebak pandemik COVID-19 yang mewabah di 215 negara, termasuk Indonesia. Guna menekan dan memutuskan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan Corona Virus Disease-19 di Kota Medan. Sepanjang tahun

2020 pasien Covid terdata berjumlah 12.569 jiwa. Wilayah Kota Medan hampir seluruhnya Zona Merah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Laporan Gugus Tugas Covid

Table 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Medan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2018 - 2022					Realisasi Capaian Tahun 2018 - 2022					Rasio Capaian pada Tahun 2018 - 2022				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				Na	Na	100	100	100	Na	Na	0	34,87	45,94	Na	Na	0	34,87	45,94
2	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap				100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na

3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				100	100	Na	Na	Na	100	0	Na	Na	Na	100	0	Na	Na	Na
2	Persentase korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana				Na	Na	100	100	100	Na	Na	100	100	100	0	0	100	100	100

Pada Tahun 2019, Realisasi Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat tidak terlaksana di karenakan pada tahun tersebut tidak ada dikeluarkan Surat Keputusan Wali Kota untuk Masa Tanggap Darurat, namun BPBD tetap memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat bencana.

Pada Tahun 2020, banyak kegiatan yang tidak terlaksana dan dihapuskan sehingga Indikator Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana tidak terlaksana dikarenakan adanya efisiensi Anggaran Covid-19. Namun BPBD tetap berupaya memberikan Sosialisasi, Informasi, dan Edukasi mengenai covid – 19 kepada masyarakat.

Pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota Medan masih belum bisa memenuhi target, di karenakan cakupan wilayah kota medan yang sangat luas, dan tingginya penduduk kota medan berbanding terbalik dengan SDM BPBD dan Anggaran.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Sebelum Perubahan 2016 - 2020

Uraian Pro- gram/Kegi- atan/Sub Kegiatan	<i>Anggaran pada Tahun 2016 - 2020</i>					<i>Realisasi Anggaran pada Tahun 2016 - 2020</i>					<i>Rasio antara Real- isasi dan Anggaran Tahun Ke -</i>					<i>Rata - rata Per- tumbuhan</i>		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	<i>Ang- garan</i>	<i>Real- isasi</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	
Program Pening- katan Penye- leng- garaan Penanggu- langan Bencana	2.858. 218.00 0	3.315. 000.0 00	3.279. 949.9 26	2.734. 711.1 19	7.366. 105.38 1	1.551. 936.5 00	2.002. 538.5 50	2.214. 903.9 25	2.470. 274.4 55	6.949. 963.33 0	5 4	6 0	6 8	9 0	9 4	3.910. 796.8 85	3.037. 923.3 52	
<i>Posko Siaga Bencana</i>	<i>1.365.3 20.000</i>	<i>600.00 0.000</i>	<i>594.60 0.000</i>	<i>596.85 8.045</i>	<i>496.889 .648</i>	<i>930.48 5.000</i>	<i>509.28 2.000</i>	<i>580.40 0.000</i>	<i>585.35 0.000</i>	<i>495.303 .000</i>	<i>68</i>	<i>85</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>10 0</i>	730.7 33.53 9	620.1 64.00 0	
<i>Penyuluhan Pening- katan Ke- waspa- daan Masyara- kat Ter- hadap Ba- haya Bencana</i>	<i>0</i>	<i>145.00 0.000</i>	<i>155.00 0.000</i>	<i>114.99 6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.500. 000</i>	<i>84.700. 000</i>	<i>103.47 6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46</i>	<i>55</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>82.999. 200</i>	<i>50.935. 200</i>	

<i>Pelatihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Pencarian Korban dengan Instansi Terkait</i>	0	145.000.000	0	0	0	0	86.652.000	0	0	0	0	60	0	0	0	29.000.000	17.330.400	
<i>Simulasi Penanggulangan Bencana Terhadap Masyarakat Rawan Bencana di Kota Medan</i>	125.000.000	145.000.000	155.000.000	114.996.000	0	0	79.610.000	86.925.000	97.736.000	0	0	55	56	85	0	107.999.200	52.854.200	
<i>Simulasi Peringatan Dini Jalur Evakuasi Gedung Bertingkat di Kota Medan</i>	0	135.000.000	0	0	0	0	62.795.000	0	0	0	0	47	0	0	0	27.000.000	12.559.000	
<i>Posko Kedaruratan Saat Tanggap Darurat</i>	50.000.000	150.000.000	0	0	0	0	tidak terealisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	-	

<i>Pelatihan Lanjutan TRC BPBD Kota Medan</i>	100.00 0.000	125.00 0.000	122.22 0.400	124.24 6.350	102.910 .815	<i>tidak terealisasi</i>	89.331. 000	79.582. 125	97.374. 000	99.246. 400	0	71	65	78	96	114.87 5.513	-	
<i>Pengembangan Fasilitas Dapur Bencana</i>	133.21 8.000	200.00 0.000	0	0	0	112.16 0.000	196.48 2.000	0	0	0	84	98	0	0	0	66.643. 600	61.728. 400	
<i>Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana</i>	200.00 0.000	200.00 0.000	212.69 5.400	224.57 4.773	275.635 .330	176.22 0.000	196.28 6.000	206.40 5.400	224.57 3.005	274.785 .330	88	98	97	10 0	10 0	222.58 1.101	215.65 3.947	
<i>Bantuan Logistik Bencana</i>	0	200.00 0.000	220.68 7.200	350.00 0.000	396.377 .400	0	196.56 0.000	179.52 2.200	350.00 0.000	389.572 .200	0	98	81	10 0	98	233.41 2.920	223.13 0.880	
<i>Pengadaan Makan dan Minum Tanggap Bencana</i>	300.00 0.000	200.00 0.000	218.72 5.600	100.85 0.000	500.850 .000	30.015. 000	<i>tidak terealisasi</i>	<i>tidak terealisasi</i>	55.200. 000	492.050 .000	10	0	0	55	98	264.08 5.120	-	
<i>Transportasi Expedisi Bantuan Hibah</i>	50.000. 000	0	0	70.000. 000	20.000. 000	<i>tidak terealisasi</i>	0	0	0	19.500. 000	0	0	0	0	98	28.000. 000	-	

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Korban Bencana	75.000.000	200.000.000	0	0	0	70.622.500	tidak terealisasi	0	0	0	94	0,0	0	0	0	55.000.000	-	
Pengadaan Sembako untuk Korban Bencana	100.000.000	0	0	0	0	96.498.000	0	0	0	0	96	0	0	0	0	20.000.000	19.299.600	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.000.000	100.000.000	0	50.000.000	37.500.000	4.450.000	tidak terealisasi	0	41.950.000	37.400.000	9	0	0	84	100	47.500.000	-	
Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait Pasca Bencana	0	50.000.000	22.511.800	32.471.000	0	0	18.000.000	15.432.000	29.233.500	0	0,0	36	69	90	0	20.996.560	12.533.100	
Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana	84.680.000	100.000.000	530.028.600	0	0	41.838.000	94.075.800	384.572.400	0	0	49	94	73	0	0	142.941.720	104.097.240	

<i>Sosialisasi Pengenalan Bahaya dan Resiko Bencana Terhadap Masyarakat di Kota Medan</i>	0	145.00 0.000	155.00 0.000	114.99 6.000	0	0	74.300. 000	94.523. 250	103.37 3.000	0	0	51	61	90	0	82.999. 200	54.439. 250	
<i>Bahan Konstruksi Bangunan Pasca Bencana</i>	100.00 0.000	200.00 0.000	230.64 3.700	200.56 7.640	284.821 .920	89.648. 000	194.00 0.000	227.10 3.000	199.55 0.000	282.365 .000	90	97	98	99	99	203.20 6.652	198.53 3.200	
<i>Penyuluhan Pengembangan Budaya Sadar bencana terhadap Masyarakat di Kota Medan</i>	125.00 0.000	145.00 0.000	155.00 0.000	114.99 6.000	0	tidak terreal- isasi	70.325. 000	96.426. 250	101.67 3.000	0	0	49	62	88	0	107.99 9.200	-	
<i>Temu Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait tentang Penyelenggaraan</i>	0	80.000. 000	0	0	0	0	42.165. 750	0	0	0	0	53	0	0	0	16.000. 000	8.433.1 50	

Sosialisasi Pengenalan Gejala, Resiko dan Menghadapi Bencana di Sekolah - Sekolah dasar Rawan Bencana	0	0	0	36.000.000	0	0	0	0	32.750.000	0	0	0	0	91	0	7.200.000	6.550.000	
Pembuatan Brosur, Leaflet, Stiker, dan sejenisnya.	0	0	0	9.762.120	19.954.215	0	0	0	9.432.000	tidak terealisasi	0	0	0	97	0	5.943.267	-	
Peningkatan Peran Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana	0	0	0	99.100.800	0	0	0	0	87.001.000	0	0	0	0	88	0	19.820.160	17.400.200	
Pengelolaan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana	0	0	114.540.000	0	0	0	0	tidak terealisasi	0	0	0	0	0	0	0	22.908.000	-	

<i>Pelaksanaan Pameran Penanggulangan Bencana</i>	0	0	56.162.880	91.455.950	84.854.053	0	0	<i>tidak terealisasi</i>	84.905.950	84.540.300	0	0	0	93	100	46.494.577	-	
<i>Pelatihan Pasca Bencana</i>	0	0	68.202.500	117.960.281	0	0	0	36.810.000	97.201.000	0	0	0	54	82	0	37.232.556		
<i>Studi dan Inventarisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</i>	0	0	0	96.775.000	0	0	0	0	95.525.000	0	0	0	0	99	0	19.355.000	19.105.000	
<i>Pemulihan mental psikologis korban bencana</i>	0	0	40.335.000	0	0	0	0	29.900.000	0	0	0	0	74	0	0	8.067.000	5.980.000	
<i>Pengkajian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana</i>	0	50.000.000	51.480.100	74.105.160	0	0	26.174.000	18.434.300	73.971.000	0	0	52	36	100	0	35.117.052	23.715.860	
<i>Pembentukan dan Pelatihan Relawan Team Reaksi Ce-</i>	0	0	143.518.400	0	0	0	0	94.168.000	0	0	0	0	66	0	0	28.703.680	18.833.600	

pat Kota Medan																		
Pelaporan dan Inven- tarisasi re- habilitasi dan rekon- struksi pasca bencana	0	0	33.598. 346	0	0	0	0	tidak tereal- isasi	0	0	0	0	0	0	0	6.719.6 69	-	
Rehabilitasi dan Rekon- struksi Pasca Bencana	0	0	0	0	5.146.3 12.000	0	0	0	0	4.775.2 01.100	0	0	0	0	93	1.029.2 62.400	955.04 0.220	
Program Pelayanan Admin- istrasi Per- kantoran	2.066. 358.60 0	2.271. 881.1 40	2.763. 364.4 08	3.116. 811.1 34	2.980. 431.52 3	1.777. 157.1 46	2.031. 634.9 79	2.462. 864.5 90	2.918. 818.5 00	2.739. 984.40 2	8 6	8 9	8 9	9 4	9 2	2.639. 769.3 61	2.386. 091.9 23	
Penyediaan Jasa Komu- nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.90 0.000	178.80 0.000	147.98 8.800	134.99 6.000	149.286 .400	72.606. 267	58.849. 970	90.644. 883	80.135. 460	84.035. 030	69	33	61	59	56	143.39 4.240	77.254. 322	

<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	60.000.000	59.500.000	50.949.888	58.085.163	45.047.771	55.015.203	55.932.848	37.366.530	55.134.203	44.646.556	92	94	73	95	99	54.716.564	49.619.068	
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	60.000.000	60.000.000	50.073.280	69.926.730	21.626.898	26.725.668	12.896.115	5.004.129	54.268.200	13.159.622	45	21	10	78	61	52.325.382	22.410.747	
<i>Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	20.000.000	20.000.000	14.582.400	44.920.844	19.743.836	16.745.000	995.000	9.987.175	44.919.260	19.432.000	84	5	68	100	98	23.849.416	18.415.687	
<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	74.925.000	74.925.000	70.488.000	82.000.000	100.000.000	42.590.000	39.407.500	54.675.000	58.360.000	35.394.000	57	53	78	71	35	80.467.600	46.085.300	
<i>Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran</i>	1.495.533.600	1.728.656.780	2.184.000.000	2.340.572.332	2.513.763.130	1.493.267.442	1.728.156.741	2.100.292.536	2.266.310.013	2.507.994.572	100	100	96	97	100	2.052.505.168	2.019.204.261	

<i>Penyediaan Alat - alat Kebersihan Kantor</i>	50.000.000	49.999.360	45.282.040	36.838.263	30.963.488	45.927.566	36.843.035	37.495.424	34.496.836	7.564.482	92	74	83	94	24	42.616.630	32.465.469	
<i>Pemasangan Instalansi Listrik</i>	0	0	0	0	0	24.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4.856.000	
<i>Fasilitas Pembuatan PERDA Tentang Penanggulangan Bencana di Kota Medan</i>	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	-	
<i>Pembuatan CD Profil BPBD Kota Medan</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
<i>Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah</i>	0	100.000.000	200.000.000	340.000.000	100.000.000	0	98.553.770	127.398.913	316.122.926	27.758.140	0	99	64	93	28	148.000.000	113.966.750	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	9.471.802	0	0	0	0	9.071.602	0	0	0	0	96	0	1.894.360	1.814.320	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.078.095.000	877.900.000	400.587.400	715.300.158	206.801.845	778.322.768	581.157.699	217.616.294	699.230.197	201.237.802	72	66	54	98	97	655.736.881	495.512.952	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	118.000.000	118.000.000	0	59.419.940	0	110.578.625	98.924.000	0	59.413.700	0	94	84	0	100	0	59.083.988	53.783.265	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	263.936.195	100.000.000	0	143.999.218	0	238.282.500	89.262.220	0	141.705.000	0	90	89	0	98	0	101.587.083	93.849.944	
Pengadaan Mebeleur	80.000.000	80.000.000	0	96.231.000	0	72.640.000	76.350.000	0	95.381.000	0	91	95	0	99	0	51.246.200	48.874.200	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor	134.100.000	134.100.000	39.999.000	90.000.000	0	128.984.000	129.830.000	0	89.879.900	0	96	97	0	100	0	79.639.800	69.738.780	

<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	300.80 0.000	300.80 0.000	218.55 4.000	191.90 0.000	148.301 .845	151.49 8.643	152.24 2.479	188.48 7.194	181.71 3.097	146.762 .802	50	51	86	95	99	232.07 1.169	164.14 0.843	
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor</i>	45.000. 000	45.000. 000	41.500. 000	88.750. 000	27.500. 000	tidak terreal- isasi	tidak terreal- isasi	tidak terreal- isasi	88.642. 500	23.500. 000	0, 0	0, 0	0	10 0	85	49.550. 000	-	
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor</i>	100.00 0.000	100.00 0.000	100.53 4.400	45.000. 000	31.000. 000	44.205. 000	34.549. 000	29.129. 100	42.495. 000	30.975. 000	44	35	29	94	10 0	75.306. 880	36.270. 620	
<i>Pengadaan Peralatan Rumah Tangga</i>	36.258. 805	0	0	0	0	32.134. 000	0	0	0	0	89	0	0	0	0	7.251.7 61	6.426.8 00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	276.45 0.000	169.3 50.00 0	144.0 23.00 0	283.3 76.18 6	0	247.0 90.00 0	160.0 86.58 0	138.8 23.00 0	283.3 72.97 0	0	8 9	9 5	9 6	1 0 0	0	174.6 39.83 7	165.8 74.51 0	

<i>Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu</i>	81.900.000	71.550.000	54.730.000	78.266.390	0	70.410.000	68.800.000	51.630.000	78.264.450	0	86	96	94	100	0	57.289.278	53.820.890	
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Kelengkapannya</i>	136.250.000	75.450.000	68.998.000	114.752.640	0	122.400.000	71.816.580	66.898.000	114.752.000	0	90	95	97	100	0	79.090.128	75.173.316	
<i>Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya</i>	58.300.000	22.350.000	20.295.000	90.357.156	0	54.280.000	19.470.000	20.295.000	90.356.520	0	93	87	100	100	0	38.260.431	36.880.304	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134.100.000	134.100.000	39.999.000	90.000.000	0	128.984.000	129.830.000	0	89.879.900	0	96	97	0	100	0	79.639.800	69.738.780	
<i>Pembinaan keolahragaan</i>	36.000.000	36.000.000	53.600.000	92.000.000	23.000.000	15.000.000	26.400.000	31.040.000	78.280.000	12.320.000	42	73	58	85	54	48.120.000	32.608.000	
<i>Pelatihan Pengembangan Fisik dan Mental</i>	87.000.000	0	146.049.400	0	102.490.400	tidak terealisasi	0	104.855.500	0	102.490.400	0	0	72	0	100	67.107.960	#VALUE!	

<i>Aparatur</i>																		
<i>Penyediaan Alat - alat Kebersihan Kantor</i>	50.000.000	49.999.360	45.282.040	36.838.263	30.963.488	45.927.566	36.843.035	37.495.424	34.496.836	7.564.482	92	74	83	94	24	42.616.630	32.465.469	
<i>Pemasangan Instalansi Listrik</i>	0	0	0	0	0	24.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4.856.000	
<i>Fasilitas Pembuatan PERDA Tentang Penanggulangan Bencana di Kota Medan</i>	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	-	
<i>Pembuatan CD Profil BPBD Kota Medan</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
<i>Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah</i>	0	100.000.000	200.000.000	340.000.000	100.000.000	0	98.553.770	127.398.913	316.122.926	27.758.140	0	99	64	93	28	148.000.000	113.966.750	

<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	0	0	0	9.471.802	0	0	0	0	9.071.602	0	0	0	0	96	0	1.894.360	1.814.320	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.078.095.000	877.900.000	400.587.400	715.300.158	206.801.845	778.322.768	581.157.699	217.616.294	699.230.197	201.237.802	72	66	54	98	97	655.736.881	495.512.952	
<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	118.000.000	118.000.000	0	59.419.940	0	110.578.625	98.924.000	0	59.413.700	0	94	84	0	100	0	59.083.988	53.783.265	
<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	263.936.195	100.000.000	0	143.999.218	0	238.282.500	89.262.220	0	141.705.000	0	90	89	0	98	0	101.587.083	93.849.944	
<i>Pengadaan Mebeleur</i>	80.000.000	80.000.000	0	96.231.000	0	72.640.000	76.350.000	0	95.381.000	0	91	95	0	99	0	51.246.200	48.874.200	
<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor</i>	134.100.000	134.100.000	39.999.000	90.000.000	0	128.984.000	129.830.000	0	89.879.900	0	96	97	0	100	0	79.639.800	69.738.780	

<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	300.80 0.000	300.80 0.000	218.55 4.000	191.90 0.000	148.301 .845	151.49 8.643	152.24 2.479	188.48 7.194	181.71 3.097	146.762 .802	50	51	86	95	99	232.07 1.169	164.14 0.843	
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor</i>	45.000. 000	45.000. 000	41.500. 000	88.750. 000	27.500. 000	tidak terreal- isasi	tidak terreal- isasi	tidak terreal- isasi	88.642. 500	23.500. 000	0, 0	0, 0	0	10 0	85	49.550. 000	-	
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor</i>	100.00 0.000	100.00 0.000	100.53 4.400	45.000. 000	31.000. 000	44.205. 000	34.549. 000	29.129. 100	42.495. 000	30.975. 000	44	35	29	94	10 0	75.306. 880	36.270. 620	
<i>Pengadaan Peralatan Rumah Tangga</i>	36.258. 805	0	0	0	0	32.134. 000	0	0	0	0	89	0	0	0	0	7.251.7 61	6.426.8 00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	20.000 .000	22.50 0.000	12.42 5.732	4.650. 000	0	3.660. 000	0	0	0	0	1 8	0	0	0	0	11.91 5.146	732.0 00	

<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD</i>	0	11.250.000	3.695.136	4.650.000	0	tidak terealisasi	tidak terealisasi	tidak terealisasi	tidak terealisasi	tidak terealisasi	0	0	0	0	0	3.919.027	-	
<i>Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD</i>	0	0	5.043.710	0	0	0	0	tidak terealisasi	0	0	0	0	0	0	0	1.008.742	-	
<i>Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</i>	0	11.250.000	3.686.886	0	0	0	tidak terealisasi	tidak terealisasi	0	0	0	0	0	0	0	2.987.377	-	
<i>Pemutakhiran Renstra</i>	20.000.000	0	0	0	0	3.660.000	0	0	0	0	18	0	0	0	0	4.000.000	732.000	
Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	-	

<i>Pelaksanaan Perayaan HUT RI</i>	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	-	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	16.000.000	16.000.000	0	0	0	tidak terealisasi	tidak terealisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000	-	
<i>Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah/bantuan Sosial</i>	16.000.000	16.000.000	0	0	0	tidak terealisasi	tidak terealisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000	-	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	11.250.000	0	3.400.888	0	0	tidak terealisasi	0	tidak terealisasi	0	0	0	0	0	0	2.930.178	0	
<i>Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD</i>	0	11.250.000	0	3.400.888	0	0	tidak terealisasi	0	tidak terealisasi	0	0	0	0	0	0	2.930.178	-	
																-	-	

JUMLAH	6.488. 121.60 0	6.719. 881.1 40	6.799. 999.8 66	6.950. 249.4 85	10.678 .829.1 49	4.373. 166.4 14	4.801. 817.8 08	5.170. 103.3 09	6.449. 976.1 22	10.005 .995.9 34	6 7	7 1	7 6	9 3	9 4	7.527. 416.2 48	6.160. 211.9 17	
---------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Tabel 2.8 **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD** Sesudah Perubahan 2021 - 2026

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran pada Tahun 2021 - 2026						Realisasi Anggaran pada Tahun 2021 – 2026						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -						Rata - rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1		3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	8	9	10	11		12	13	14
Program Penanggulangan Bencana		8.85 1.27 7.41 0	10.686. 083.808	26.735. 521.459	5.514.9 48.760	6.857.2 63.598	6.624.6 54.234	7.761.9 27.536	9.919.7 18.335	26.735. 521.459	5.514.9 48.760	6.857.2 63.598	6.624. 654.2 34	87 ,7	92 ,8	10 0	10 0	10 0	10 0	10.878. 291.545	10.56 9.005. 654
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	928. 581. 400	813.005 .000	231.587 .635	334.999 .260	338.349 .253	341.732 .745	857.625 .900	765.901 .100	231.587 .635	334.999 .260	338.349 .253	341.7 32.74 5	92 ,4	94 ,2	10 0	10 0	10 0	10 0	498.042 .549	478.3 65.98 2
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	928. 581. 400	464.805. 000	231.587. 635	334.999. 260	338.349. 253	341.732. 745	857.625. 900	423.820. 000	231.587. 635	334.999. 260	338.349. 253	341.73 2.745	92, 4	91, 2	10 0	10 0	10 0	10 0	440.009 .215	421.3 52.46 5
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		348.200. 000						342.081. 100						98, 2					58.033. 333	57.01 3.517

	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.25 1.12 3.76 0	7.261.2 73.808	20.360. 642.264	2.311.0 38.380	2.462.4 77.014	2.487.1 01.784	4.448.7 36.386	6.703.5 50.890	20.360. 642.264	2.311.0 38.380	2.462.4 77.014	2.487. 101.7 84	84 ,7	92 ,3	10 0	10 0	10 0	10 0	6.688.9 42.835	6.462. 257.7 86
	Penyusunan Rencana Pe- nanggulangan Bencana Ka- bupaten/Kota		298.200. 000						291.734. 100						97, 8					49.700. 000	48.62 2.350
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Ka- bupaten/Kota	146. 466. 000	146.466. 000	128.328. 250	250.487. 720	252.992. 597	255.522. 523	146.066. 000	145.566. 000	128.328. 250	250.487. 720	252.992. 597	255.52 2.523	99, 7	99, 4	10 0	10 0	10 0	10 0	196.710 .515	196.4 93.84 8
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasa- rana Kesiapsi- agaan Ter- hadap Bencana Ka- bupaten/Kota	595. 366. 200	1.131.11 8.460	687.776. 276	754.358. 460	761.902. 045	769.521. 065	595.366. 200	1.045.81 7.200	687.776. 276	754.358. 460	761.902. 045	769.52 1.065	10 0,0	92, 5	10 0	10 0	10 0	10 0	783.340 .418	769.1 23.54 1
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsi- agaan ter- hadap Bencana		2.448.64 6.720	616.656. 528	304.924. 550	307.973. 796	311.053. 533		2.258.86 1.000	616.656. 528	304.924. 550	307.973. 796	311.05 3.533		92, 2	10 0	10 0	10 0	10 0	664.875 .854	633.2 44.90 1

	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			18.279.207.400					18.279.207.400							100				3.046.534.567	3.046.534.567
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	146.466.000	146.266.000		83.720.600	84.557.806	85.403.384	108.216.000	145.066.000		83.720.600	84.557.806	85.403.384	73,9	99,2		100	100	100	91.068.965	84.493.965
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	4.244.292.060	2.578.565.628					3.489.099.186	2.336.429.590					82,2	90,6					1.137.142.948	970.921.463
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	118.533.500	377.951.000	264.237.100	302.960.960	305.990.570	309.050.475	109.989.000	377.001.000	264.237.100	302.960.960	305.990.570	309.050.475	92,8	99,7	100	100	100	100	279.787.267	278.204.851
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					128.328.250	129.611.533					128.328.250	129.611.533					100	100	42.989.964	42.989.964

	Penyusunan Rencana Kontijensi			300.000.000	359.250.000	362.842.500	366.470.925			300.000.000	359.250.000	362.842.500	366.470.925			100	100	100	100	231.427.238	231.427.238
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		134.060.000	84.436.710	255.336.090	257.889.451	260.468.345		103.076.000	84.436.710	255.336.090	257.889.451	260.468.345		76,9	100	100	100	100	165.365.099	160.201.099
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.671.572.250	2.611.805.000	3.376.070.000	2.471.074.150	3.058.221.992	2.787.622.211	2.455.565.250	2.450.266.345	3.376.070.000	2.471.074.150	3.058.221.992	2.787.622.211	91,9	93,8	100	100	100	100	2.829.394.267	2.766.469.991
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	549.975.000	1.548.126.200	1.358.376.000	1.358.376.000	1.371.959.760	1.385.679.358	469.250.000	1.388.860.145	1.358.376.000	1.358.376.000	1.371.959.760	1.385.679.358	85,3	89,7	100	100	100	100	1.262.082.053	1.222.083.544
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota					264.237.100	266.879.471					264.237.100	266.879.471					100	100	88.519.429	88.519.429

		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Ka- bupaten/Kota					298.200. 000						298.200. 000					10 0		49.700. 000	49.70 0.000	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Ka- bupaten/Kota	2.12 1.59 7.25 0	1.063.67 8.800	2.017.69 4.000	1.112.69 8.150	1.123.82 5.132	1.135.06 3.383	1.986.31 5.250	1.061.40 6.200	2.017.69 4.000	1.112.69 8.150	1.123.82 5.132	1.135. 063.38 3	93, 6	99, 8	10 0	10 0	10 0	10 0	1.429.0 92.786	1.406. 167.0 19
	Penataan Sistem Dasar Pe- nanggulangan Bencana				2.767.2 21.560	397.836 .970	998.215 .340	1.008.1 97.493			2.767.2 21.560	397.836 .970	998.215 .340	1.008. 197.4 93			10 0	10 0	10 0	10 0	861.911 .894	861.9 11.89 4
		Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupat- en/Kota			2.767.22 1.560	397.836. 970	401.815. 340	405.833. 493			2.767.22 1.560	397.836. 970	401.815. 340	405.83 3.493			10 0	10 0	10 0	10 0	662.117 .894	662.1 17.89 4
		Penyusunan Kajian Kebu- tuhan Pas- cabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana					298.200. 000	301.182. 000					298.200. 000	301.18 2.000					10 0	10 0	99.897. 000	99.89 7.000

	(R3P) Kab/Kota																				
	Penguatan Kelembagaan Bencana Ka- bupaten/Kota					298.200. 000	301.182. 000					298.200. 000	301.18 2.000					10 0	10 0	99.897. 000	99.89 7.000
PROGRAM PENUN- JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPAT- EN/KOTA		10.0 11.2 97.8 60	11.627. 082.308	13.362. 327.671	13.762. 890.249	14.359. 859.823	14.534. 889.419	7.489.7 90.138	11.213. 031.149	13.362. 327.671	13.762. 890.249	14.359. 859.823	14.53 4.889. 419	74 ,8	96 ,4	10 0	10 0	10 0	10 0	12.943. 057.888	12.45 3.798. 075
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dae- rah	31.1 19.8 00					31.430. 998	28.669. 800					31.43 0.998	92, 1					10 0	10.425. 133	10.01 6.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.1 19.8 00					31.430.9 98	28.669.8 00					31.430 .998	92, 1					10 0	10.425. 133	10.01 6.800

	Administrasi Keuangan Perangkat Dae- rah	6.03 1.86 7.00 0	6.151.8 80.871	7.268.3 85.748	7.429.6 98.010	7.503.9 94.990	7.579.0 34.940	3.996.0 57.832	5.927.0 62.710	7.268.3 85.748	7.429.6 98.010	7.503.9 94.990	7.579. 034.9 40	66 ,2	96 ,3	10 0	10 0	10 0	10 0	6.994.1 43.593	6.617. 372.3 72
	Penyediaan Gaji dan Tun- jangan ASN	6.03 1.86 7.00 0	6.151.88 0.871	7.268.38 5.748	7.429.69 8.010	7.503.99 4.990	7.579.03 4.940	3.996.05 7.832	5.927.06 2.710	7.268.38 5.748	7.429.69 8.010	7.503.99 4.990	7.579. 034.94 0	66, 2	96, 3	10 0	10 0	10 0	10 0	6.994.1 43.593	6.617. 372.3 72
	Administrasi Kepengawasan Perangkat Dae- rah	82.1 40.0 00	398.822 .700	195.248 .460	383.884 .460	387.723 .305	391.600 .538	73.926. 000	397.886 .400	195.248 .460	383.884 .460	387.723 .305	391.6 00.53 8	90 ,0	99 ,8	10 0	10 0	10 0	10 0	306.569 .910	305.0 44.86 0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka- pannya	82.1 40.0 00	306.708. 300	100.000. 000	249.936. 000	252.435. 360	254.959. 714	73.926.0 00	305.772. 000	100.000. 000	249.936. 000	252.435. 360	254.95 9.714	90, 0	99, 7	10 0	10 0	10 0	10 0	207.696 .562	206.1 71.51 2
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Ber- dasarkan Tu- gas dan Fungsi		92.114.4 00	95.248.4 60	133.948. 460	135.287. 945	136.640. 824		92.114.4 00	95.248.4 60	133.948. 460	135.287. 945	136.64 0.824		10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	98.873. 348	98.87 3.348

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	645.515.600	619.854.091	659.213.844	823.106.244	831.337.306	839.650.680	220.036.070	518.971.139	659.213.844	823.106.244	831.337.306	839.650.680	34,1	83,7	100	100	100	100	736.446.294	648.719.214
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.023.600	13.159.675	10.313.660	10.442.720	10.547.147	10.652.619	11.023.600	13.159.675	10.313.660	10.442.720	10.547.147	10.652.619	100	100	100	100	100	100	11.023.237	11.023.237
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.618.900	19.881.200	29.788.853	26.730.525	26.997.830	27.267.809	19.875.200	19.597.000	29.788.853	26.730.525	26.997.830	27.267.809	96,4	98,6	100	100	100	100	25.214.186	25.042.869
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.981.600	89.881.716	82.859.623	78.765.273	79.552.926	80.348.455	47.845.900	88.980.992	82.859.623	78.765.273	79.552.926	80.348.455	95,7	99,0	100	100	100	100	76.898.265	76.392.195
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.791.500	7.291.500	19.793.708	52.139.266	52.660.659	53.187.265	12.113.600	7.291.500	19.793.708	52.139.266	52.660.659	53.187.265	94,7	100	100	100	100	100	32.977.316	32.864.333

	Penyeleng- garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	551. 100. 000	489.640. 000	516.458. 000	655.028. 460	661.578. 745	668.194. 532	129.177. 770	389.941. 972	516.458. 000	655.028. 460	661.578. 745	668.19 4.532	23, 4	79, 6	10 0	10 0	10 0	10 0	590.333 .289	503.3 96.58 0
	Pengadaan Ba- rang Milik Dae- rah Penunjang Urusan Pemerintah Dae- rah	77.0 47.8 00	386.526 .846	505.880 .919	32.113. 175	491.774 .978	496.692 .728	77.012. 800	374.450 .611	505.880 .919	32.113. 175	491.774 .978	496.6 92.72 8	10 0, 0	96 ,9	10 0	10 0	10 0	10 0	331.672 .741	329.6 54.20 2
	Pengadaan Mebel			18.975.0 00						18.975.0 00						10 0				3.162.5 00	3.162. 500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.0 47.8 00	386.526. 846	486.905. 919	32.113.1 75	491.774. 978	496.692. 728	48.047.8 00	374.450. 611	486.905. 919	32.113.1 75	491.774. 978	496.69 2.728	10 0,0	96, 9	10 0	10 0	10 0	10 0	323.676 .908	321.6 64.20 2
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kan- tor atau Bangunan Lainnya	29.0 00.0 00						28.965.0 00						99, 9						4.833.3 33	4.827. 500
	Penyediaan Jasa Penunjang Uru- san Pemerinta- han Daerah	2.72 2.24 2.66 0	2.883.4 19.800	3.684.1 86.700	4.012.1 29.360	4.052.2 50.654	4.092.7 73.160	2.676.9 32.770	2.815.2 99.680	3.684.1 86.700	4.012.1 29.360	4.052.2 50.654	4.092. 773.1 60	98 ,3	97 ,6	10 0	10 0	10 0	10 0	3.574.5 00.389	3.555. 595.3 87

	Penyediaan Jasa Komu- nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124. 946. 400	165.816. 700	186.528. 800	198.929. 000	200.918. 290	202.927. 473	79.636.5 10	106.485. 870	186.528. 800	198.929. 000	200.918. 290	202.92 7.473	63, 7	64, 2	10 0	10 0	10 0	10 0	180.011 .110	162.5 70.99 0
	Penyediaan Jasa Pela- yanan Umum Kantor	2.59 7.29 6.26 0	2.717.60 3.100	3.497.65 7.900	3.813.20 0.360	3.851.33 2.364	3.889.84 5.687	2.597.29 6.260	2.708.81 3.810	3.497.65 7.900	3.813.20 0.360	3.851.33 2.364	3.889. 845.68 7	10 0,0	99, 7	10 0	10 0	10 0	10 0	3.394.4 89.278	3.393. 024.3 97
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun- jang Urusan Pemerintahan Daerah	421. 365. 000	1.186.5 78.000	1.049.4 12.000	1.081.9 59.000	1.092.7 78.590	1.103.7 06.376	417.154 .866	1.179.3 60.609	1.049.4 12.000	1.081.9 59.000	1.092.7 78.590	1.103. 706.3 76	99 ,0	99 ,4	10 0	10 0	10 0	10 0	989.299 .828	987.3 95.24 0
	Penyediaan Jasa Pemeli- haraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapan- gan	242. 615. 000	911.578. 000	728.750. 000	803.220. 000	811.252. 200	819.364. 722	242.040. 866	906.188. 392	728.750. 000	803.220. 000	811.252. 200	819.36 4.722	99, 8	99, 4	10 0	10 0	10 0	10 0	719.463 .320	718.4 69.36 3
	Pemeli- haraan/Rehabi- litasi Gedung Kan- tor dan Bangunan	90.0 00.0 00	200.000. 000	194.650. 000	199.917. 000	201.916. 170	203.935. 332	87.809.0 00	199.601. 217	194.650. 000	199.917. 000	201.916. 170	203.93 5.332	97, 6	99, 8	10 0	10 0	10 0	10 0	181.736 .417	181.3 04.78 6

		Lainnya																			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.750.000	75.000.000	126.012.000			87.305.000	73.571.000	126.012.000				98,4	98,1	100				48.293.667	47.814.667
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				78.822.000	79.610.220	80.406.322			78.822.000	79.610.220	80.406.322				100	100	100	39.806.424	39.806.424
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			178.114.400					114.285.400						64,2						178.114.400	114.285.400
		Penataan Organisasi	178.114.400					114.285.400						64,2						178.114.400	114.285.400

		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	178.114.400					114.285.400						64,2						178.114.400	114.285.400	
		JUMLAH	19.040.689.670	22.313.166.116	40.097.849.130	19.277.839.009	21.217.123.421	21.159.543.653	15.366.003.074	21.132.749.484	40.097.849.130	19.277.839.009	21.217.123.421	21.159.543.653	80,7	94,7	100	100	100	100	23.851.035.166	23.041.851.295

Berdasarkan Table diatas, Pada Tahun 2021 Rasio Antara Anggaran dan Realisasi 80,7 % sedangkan Tahun 2022 rasio Antara Anggaran dan Realisasi 94,7. Maka dapat disimpulkan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana sudah berjalan dengan baik. Untuk Tahun 2023 – 2026 di harapkan mencapai progress 100% dengan Rata-rata Pertumbuhan Anggaran sebesar Rp. 23.851.035.166, dengan Realisasi Rp. 23.041.851.295, Berdasarkan Pagu APBD Kota medan

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan dibidang penanggulangan bencana adalah:

- Jumlah pegawai secara kualitas dan kuantitas kurang memadai
- Jumlah anggaran yang masih perlu ditingkatkan
- Sarana dan prasarana yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya
- Hubungan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat masih perlu ditingkatkan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Secara nasional, seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

- (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
- (2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:
 1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap

darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain:
 - (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif;
 - (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah.
3. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di

daerah, meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah, secara rinci masalah yang dihadapi antara lain:

- (1) Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- (2) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka mitigasi bencana;
- (3) Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan mitigasi bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- (4) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan mitigasi bencana antar daerah di Sumatera Utara dalam penanggulangan bencana;
- (5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (6) Adanya keterbatasan sarana komunikasi
- (7) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam
- (8) Masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;

b. Peluang

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan pada masa yang akan datang antara lain:

1. Ditetapkannya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas dalam pembangunan Nasional, yakni Prioritas nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

2. Ditetapkannya mitigasi bencana pada program pembangunan prioritas RPJMD Kota Medan Tahun 2020-2021.
3. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, yang memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Kota Medan secara merata
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana;
5. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
6. Banyaknya pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan diberbagai tempat di Kota Medan dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik; dan
7. Adanya komitmen dari seluruh komponen pemerintah kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
8. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana.
9. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat pemerintah kota dan kecamatan.
10. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik daerah, nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang muncul dalam pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diuraikan dalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan dan ancaman baik dari internal maupun eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana uraian berikut:

a. Faktor Lingkungan Internal

1. Belum memadai prosedur, kebijakan dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan Bencana di Kota Medan termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta aturan turunannya.
2. Belum terbangun sistim informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi baik dari kelurahan ke kecamatan, maupun dari kecamatan ke Kota Medan.
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana.
4. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sendiri-sendiri / sektoral.
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana, dan
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
7. Belum adanya tata Kelola logistic, distribusi logistic dan Kemitraan logistic yang baik.

b. Faktor Lingkungan Eksternal

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Medan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di SKPD untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Medan.
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku kepentingan kota tentunya memiliki harapan – harapan, gambaran dan keinginan yang seringkali diwujudkan serta diekspresikan dalam bentuk tuntunan, kebutuhan dan kepentingan kota pada masa yang akan datang. Kesemua itulah yang dibayangkan oleh segenap stakeholder, sebagai Kota Masa Depan yang diharapkan dapat diwujudkan secara bersama-sama, dengan kata lain seluruh warga kota tentunya memiliki bayangan tentang Kota Medan Kota Masa Depan

Untuk itulah, visi bersama pembangunan kota 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) dirumuskan:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”.

Untuk tercapainya visi diatas, Pemerintahn Kota Medan juga telah menetapkan misi, yaitu:

1. Medan Berkah, mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai - nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Maju, memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
3. Medan Bersih, menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
4. Medan Membangun, membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.
5. Medan Kondusif, mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
6. Medan Inovatif, mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya
7. Medan Beridentitas, mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

BPBD Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas menjalankan visi dan misi Pemerintahan Kota Medan, dengan menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.

Misi Kota Medan yang menjadi fokus utama BPBD Kota Medan terkait penanggulangan bencana terdapat 2 Misi, yaitu **Misi Medan Berkah** dan **Misi Medan Membangun**.

Misi Medan Berkah, mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai - nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh

lapisan masyarakat. Dalam Misi Medan Berkah, BPBD mendukung Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurunnya Persentase Kemiskinan (Gini Rasio) pada korban bencana pada saat darurat bencana, BPBD berupaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Adapun Pemenuhan kebutuhan dasar yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, seperti kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan Kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan dan tempat hunian. Kemiskinan Karena bencana juga merupakan permasalahan yang harus di selesaikan menuju *zero poverty* pada Program SDG's dimana Penanggulangan Kemiskinan yang diakibatkan bencana terdapat pada Tujuan SDGs 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun.

Misi Medan Membangun. Medan Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM. Dalam misi Medan membangun, BPBD mendukung pembangunan sarana dan prasarana dalam upaya pengurangan risiko bencana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana. Masalah bencana banjir termasuk salah satu permasalahan pembangunan infrastruktur Kota Medan yang menjadi isu strategis pembangunan kota medan. BPBD merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi. Dengan ikut serta berperan dalam program Medan Tanpa Banjir (Tajir) seperti Kegiatan Gotong Royong Bersih – bersih Sungai Deli dengan target kerja 68.400m, pembangunan tanggul anti banjir rob diharapkan dapat mengurangi banjir di beberapa daerah di Kota Medan.

Jika ditelaah visi dan misi Kota Medan dihubungkan dengan tujuan, sasaran strategi, dan arah kebijakan BPBD Kota Medan, adalah sbb:

Tabel 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif								
MISI I: Misi Medan Berkah, mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai - nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat								
Misi 4: Medan Membangun, membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengurangan Risiko Bencana dan Penanganan Darurat yang Cepat, Tepat, Efektif Serta Terwujudnya Pemulihan Wilayah Pasca Bencana	Terselamatkan nya Sebanyak mungkin Korban Bencana, Terpenuhinya Kebutuhan Korban serta Terlaksananya Pemulihan Pasca Bencana	1 Menyediakan sarana dan Prasarana yang optimal seperti penyediaan peralatan yang memadai untuk penanggulangan bencana	Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan koordinasi antar lintas OPD	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai	Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis kegiatan simulasi penanggulangan bencana, secara profesional terhadap berbagai program/kegiatan penanggulangan bencana	peningkatan komitmen para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai

	Meningkatnya Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Meningkatkan Partisipasi Pentahelix penanggulangan Bencana (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media)	Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan koordinasi antar lintas OPD	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai	Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis kegiatan simulasi penanggulangan bencana, secara profesional terhadap berbagai program/kegiatan penanggulangan bencana	peningkatan komitmen para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP

Dengan penetapan arah kebijakan ini untuk penanggulangan bencana diharapkan dapat menumbuhkembangkan stabilitas, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen resiko bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanganan penanggulangan bencana tersebut, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat pusat dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) / Kesbang Linmas (jika BPBD belum terbentuk).

Pada kurun waktu 2005 – 2009 upaya pengurangan risiko bencana telah menjadi fokus prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2006 pasca kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 sebagai implementasi II dari Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025, penanggulangan

bencana telah ditetapkan menjadi salah satu Prioritas Pembangunan Nasional yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana adalah merupakan urusan bersama pemerintah, pemerintah kota, daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, maka telah dibentuk suatu rencana tingkat nasional yaitu Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) dan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) yang memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dan pemerintah kota dalam upaya melaksanakan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana secara terencana, sistematis, dan menyeluruh.

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

- a. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.
- b. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- c. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan 38 rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.2 Telaahan Renstra BNPB, BPBD Sumatera Utara dan BPBD Kota Medan

Visi BNPB	Visi Sumatera Utara	Visi Kota Medan
Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana	Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat	Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif
Misi BNPB	Misi Propinsi Sumatera Utara	Misi Kota Medan
<p>1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;</p> <p>2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;</p> <p>3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pas-cabencana melalui</p>	<p>1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.</p> <p>2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang</p>	<p>1. Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai - nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>2. Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua</p> <p>3. Menciptakan keadilan sosial me-</p>

rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengu- rangan risiko bencana;	baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebang- saan, dan memiliki ko- hesi sosial yang kuat serta harmonis.	lalui reformasi birokrasi yang ber- sih, profesional, akuntabel dan transparan ber- landaskan seman- gat melayani masyarakat serta terciptanya pela- yanan publik yang prima, adil dan merata
4. Menyelenggara- kan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan pe- nanggulangan bencana;	3. Mewujudkan Masyara- kat Sumatera Utara Yang Bermarta- bat Dalam Pendidi- kan karena masyara- katnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, ko- laboratif, berdaya saing, dan mandiri.	4. Membangun sara- na dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapan- gan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualiti- tas SDM
5. Menyelenggara- kan penanggulan- gan bencana secara transparan dengan prinsip good gov- ernance	4. Mewujudkan Masyara- kat Sumatera Utara Yang Bermarta- bat Dalam Pergaulan ka- rena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehing- ga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia. 5. Mewujudkan Masyara- kat Sumatera Utara Yang Bermarta- bat Dalam Lingkungan karena ekologi-nya yang terjaga, alamnya yang	5. Mewujudkan ken- yamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyara- kat Kota Medan melalui pening-

	bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.	katan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
	6. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.	6. Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya
	7. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebang-	7. Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemandirian demokrasi dan cinta tanah air

	<p>saan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.</p> <p>8. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.</p> <p>9. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.</p> <p>10. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan</p>	
--	--	--

	beradab.	
--	----------	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

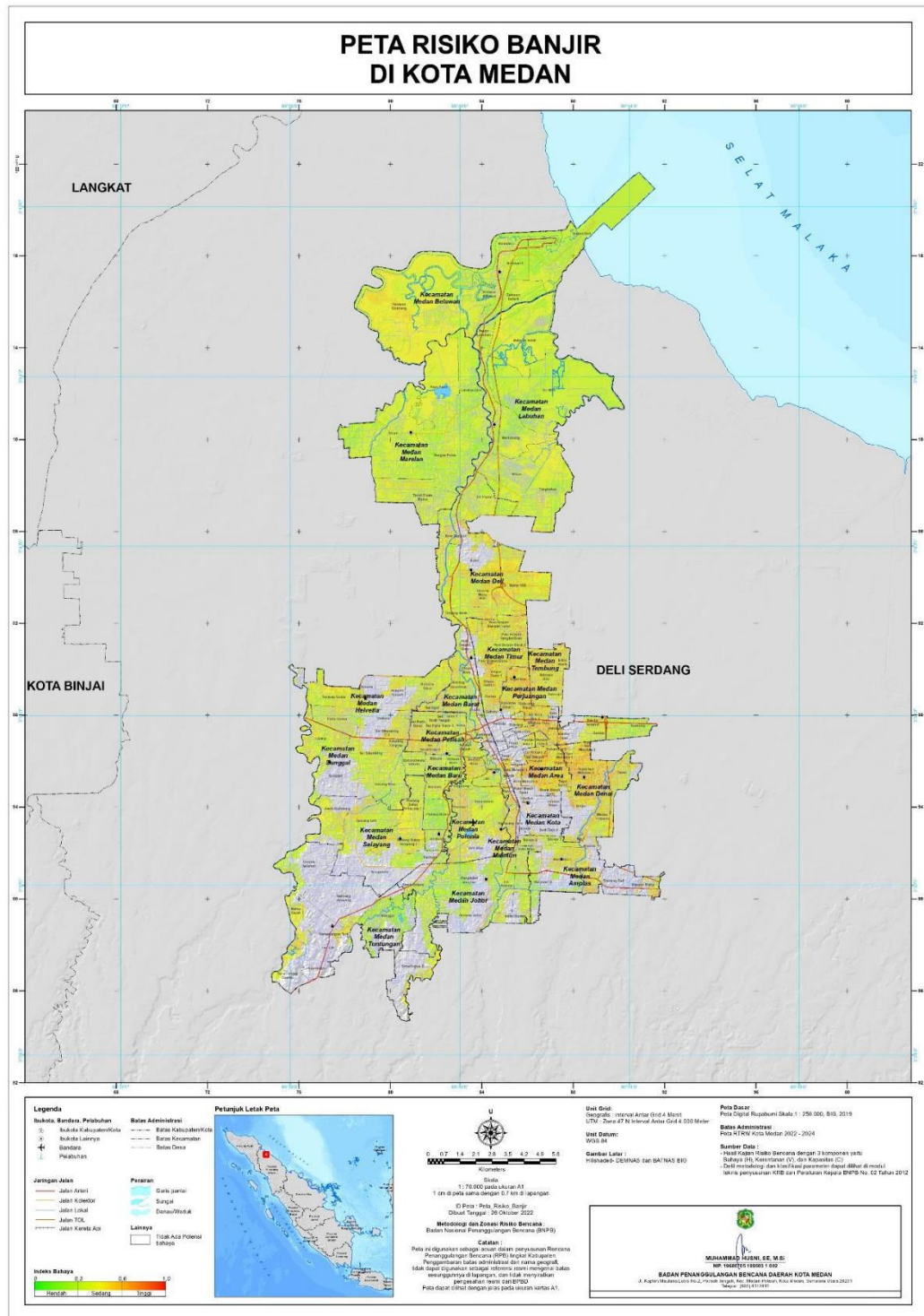
Kawasan rawan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. kawasan rawan bencana di kota medan tersebar hampir menyebar di seluruh kota medan. Ada 4 jenis kemungkinan bencana yang akan terjadi. Berdasarkan hasil mitigasi bencana alam dapat diurutkan berdasarkan prioritas yaitu:

1. Rawan Banjir di Kota Medan

Daerah rawan banjir di Kota Medan berdasarkan atas kejadiannya berturut-turut adalah Kecamatan Medan Maimun, Medan Labuhan, Medan Selayang, Medan Johor dan Medan Baru. Selanjutnya, yang paling rentan terhadap banjir rob adalah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan sebagian Kecamatan Medan Marelan. Permasalahan banjir utama disebabkan meluapnya sungai utama yakni Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Sei Sikambing, Sungai Selayang dan Sungai Sei Putih.

Lokasi – lokasi rawan banjir pada umumnya berada pada lokasi sepanjang sungai yang belum dinormalisasi dan daerah tersebut pada kenyataan berada pada dataran banjir (flood plain). Hal ini juga diperburuk dengan sistem drainase perkotaan yang belum memadai. Kondisi topografi wilayah Kota Medan yakni dari arah Selatan ke arah Utara (mengikuti arah aliran sungai) memiliki kemiringan lahan yang cukup memadai untuk mengakomodasi sistem aliran gravitasi. Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, pada tahun 2022 Kota Medan memiliki 2.575 titik genangan. Sedangkan jumlah titik genangan yang telah di tangani pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.958 Titik genangan sehingga menyisakan 617 titik genangan lagi yang perlu ditangani. Berdasarkan hasil kajian analisis yang

disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi Bencana banjir di Kota Medan total luas bahaya banjir di Kota Medan secara keseluruhan adalah 573,46 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14,02 Ha, kelas sedang seluas 356,15 Ha, sedangkan luas yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 203,29 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya banjir per kecamatan di Kota Medan, maka disimpulkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Helvetia dengan luas 1,72 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir adalah Kecamatan Medan Johor dengan luas 50,55 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Tuntungan dengan luas 80,51 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1
Peta Risiko Banjir Kota Medan

2. Rawan Gelombang Pasang di Medan

Pusat Kota Medan tidak terletak di tepi pantai, namun sedikit lebih masuk ke daratan sekitar lebih kurang 20 km. Kota yang terletak di tepi

pantai adalah Belawan. Sehingga, boleh dikatakan bahwa Kota Medan tidak terkena sapuan langsung apabila di daerah Selat Malaka terjadi gelombang pasang. Namun demikian, karena topografi Kota Medan relatif datar, dengan ketinggian daerah bervariasi mulai 3 meter sampai 35 meter di atas permukaan air pasang tertinggi, maka ada kemungkinan gelombang pasang akan mempengaruhi Kota Medan melalui sungai besar yang bermuara di Selat Malaka. Bencana yang mungkin timbul berupa banjir akibat curah hujan tinggi disertai naiknya muka air sungai pada saat terjadi gelombang pasang karena air sungai tidak bisa mengalir dengan bebas ke laut. Daerah yang merupakan rawan bencana gelombang pasang adalah kawasan Perkotaan Belawan. Daerah ini terletak pada daerah pantai yang datar dengan ketinggian daratan dari muka laut rata-rata antara 1 meter sampai dengan 5 meter. Perkampungan nelayan menghadap langsung ke Selat Malaka sehingga apabila terjadi gelombang pasang pada Selat Malaka, maka perkampungan ini akan terkena dampaknya.

3. Rawan Tsunami di Medan

Wilayah Kota Medan berdasarkan letak secara geografis, sisi Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Dengan terjadinya tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Tahun 2004 dan Pulau Nias pada Tahun 2005 berdampak terhadap pantai timur Sumatera Utara. Untuk mengantisipasi dampak tersebut maka kawasan yang berbatasan dengan Selat Malaka di Kecamatan Medan Belawan ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami.

4. Rawan Gempa Bumi di Medan

Wilayah Kota Medan ditinjau dari kondisi geologinya tidak terdapat sumber maupun jalur atau zona utama gempa, dimana sumber-sumber gempa terjadi di luar kota Medan. Namun demikian bila terjadi gempabumi yang bersumber dari luar wilayah Medan, goncangannya dapat dirasakan. Dalam kurun waktu 30 tahun atau dari tahun 1979-2008, BMG Wilayah Medan mencatat adanya 34 kejadian gempa yang

goncangannya dapat dirasakan di Kota Medan. Keseluruhan kejadian gempa tersebut, sumbernya atau pusat gempanya dari luar wilayah Medan dan tergolong gempabumi dangkal (kedalam <50 km). Dari kejadian-kejadian gempa tersebut, dengan mengacu pada skala MMI, tingkat guncangan gempa di Kota Medan secara umum tergolong dalam skala I - II MMI. Atau bila ditinjau dari tingkat guncangan menurut klasifikasi Rossi Farel tergolong dalam tingkat guncangan mikroseismik guncangan sangat lemah (drajat I – II). Tingkat guncangan paling tinggi yang pernah terjadi adalah IV – V Skala MMI atau tergolong guncangan lemah-kuat, dan itupun hanya terjadi ketika terjadi gempabumi berkekuatan besar (>8 SR), yaitu saat kejadian gempa di Aceh pada Desember 2004 dan di Nias pada Maret 2005.

Intensitas kejadian gempa yang goncangannya dirasakan di Kota Medan mengalami peningkatan (mencapai 26 kali) setelah terjadi gempa besar di Aceh maupun di Nias. Begitu juga dengan kekuatan gempanya yang rata-rata berkisar 6 SR (sebelumnya rata-rata 5 SR). Hal ini umum terjadi sebagai bagian cara bumi mencari keseimbangan setelah kejadian guncangan besar, dimana akan diikuti pelepasan-pelepasan energi dalam skala atau kekuatan yang lebih kecil. Melihat tingkat guncangan gempa yang secara umum tergolong rendah, maka daerah-daerah di Kota Medan dapat digolongkan daerah yang tidak rawan terhadap bencana gempa bumi. Namun tetap perlu diwaspadai akan potensi bencana akibat guncangan gempanya, terutama di daerah atau lokasi yang memiliki tingkat kerapatan bangunan yang tinggi, terutama pada bangunan yang berkualitas rendah atau dengan jenis bangunan yang bertingkat. Begitu juga dengan pemukiman yang ada disekitar atau di sepanjang endapan sungai. Hal tersebut dikarenakan sifat batuan yang ada disekitar sungai (batuan hasil endapan sungai) bersifat lepas dan akan memberikan guncangan yang lebih tinggi bila terjadi gempa bumi. Hal tersebut perlu disadari mengingat bencana yang ditimbulkan oleh gempa tidaklah langsung, artinya bencana terjadi akibat adanya guncangan yang dapat

menimbulkan keruntuhan gedung atau bangunan yang akhirnya akan menimbulkan korban baik jiwa maupun harta benda

Berdasarkan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) pencapaian TPB yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Medan yaitu sebagian besar masih berupa tidak ada data. Indikator yang lainnya masuk kedalam kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20). BPBD Kota Medan merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota Medan di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan. Bidang Penanggulangan bencana yang dimaksud meliputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi. Berdasarkan identifikasi Permasalahan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, hasil Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta hasil telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis. Metode yang digunakan dalam Penentuan Isu Strategis ini berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan terhadap pencegahan Kemiskinan.
2. Membangun komunikasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, Media, Akademisi, LSM, Lembaga Nasional dan internasional dalam upaya penanggulangan bencana yang terintegrasi.
3. Peningkatan kinerja OPD dengan meningkatkan koordinasi antar lintas OPD serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan

Pengurangan Risiko Bencana dan Penanganan Darurat yang Cepat, Tepat, Efektif Serta Terwujudnya Pemulihan Wilayah Pasca Bencana.

B. Sasaran

1. Terselamatkannya Sebanyak mungkin Korban Bencana, Terpenuhi Kebutuhan Korban serta Terlaksananya Pemulihan Pasca Bencana.
2. Meningkatnya Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Sebelum Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun 2021- 2026						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Tercapainya Pengu-rangan Risiko Bencana dan Penanganan Darurat yang Cepat, Tepat, Efek-tif, Serta Terwujudnya Pemulihan Wilayah Pasca Bencana		Indeks Risiko Bencana	92,84	91,92	91,01	90,1	89,2	88,31	
		Menurunnya Risiko Bencana, Terselamatkannya sebanyak Mungkin korban Bencana serta terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Sesudah Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun 2021- 2026						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pengurangan Risiko Bencana dan Penanganan Darurat yang Cepat, Tepat, Efektif Serta Terwujudnya Pemulihan Wilayah Pasca Bencana		Indeks Risiko Bencana	92,84	91,92	91,01	90,1	89,2	88,31	
		Terselamatkannya Sebanyak mungkin Korban Bencana, Terpenuhinya Kebutuhan Korban serta Terlaksananya Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100	100	100	100	100	100	

		Meningkatnya Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Cakupan Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Tersampaikan ke Masyarakat	34,87	45,94	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	57,6	63,15	63,25	63,35	63,5	63,55	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan yang telah dirumuskan memerlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi dan Arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 secara efektif dan efisien. Adapun strategi BPBD Kota Medan, yaitu:

1. Meningkatkan Partisipasi Pentahelix penanggulangan Bencana (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media)
2. Menyediakan sarana dan Prasarana yang optimal seperti penyediaan peralatan yang memadai untuk penanggulangan bencana.
3. Peningkatan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

B. Arah Kebijakan

Dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan pada program Penanggulangan Bencana di Kota Medan, telah ditetapkan beberapa kebijakan, antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan koordinasi antar lintas OPD;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai;
3. Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis kegiatan simulasi penanggulangan bencana, secara profesional terhadap berbagai program/kegiatan penanggulangan bencana;
4. peningkatan komitmen para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai;

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai
7. Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP

Strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi panduan dalam penentuan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Adapun Strategi dan Arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana table berikut;

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengu-rangan Risiko Bencana dan Pe-nanganan Darurat yang Cep-at, Tepat, Efektif Serta Ter-wujudnya Pemulihan Wilayah Pasca Bencana	Terselamatkan nya Sebanyak mungkin Korban Bencana, Ter-penuhinya Kebutuhan Korban serta Terlaksananya Pemulihan Pasca Bencana	1 Menyediakan sarana dan Prasarana yang optimal seperti penyediaan peralatan yang me-madai untuk penanggu-langan bencana	Penyediaan sarana dan prasarana penanggu-langan bencana dengan koordinasi antar lintas OPD	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelengga-ra penanggu-langan bencana di daerah dan didukung sa-rana prasa-rana pe-nanggulan-gan bencana yang me-madai	Mengoptimal-kan bimb-ingan, pen-didikan dan pelatihan, pembinaan teknis kegiatan simulasi pe-nanggulangan bencana, secara profe-sional ter-hadap berbagai pro-gram/kegiatan penanggulan-gan bencana	peningkatan komitmen para pemangku kepentingan dalam pe-nanggulan-gan bencana	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelengga-ra penanggu-langan bencana di daerah dan didukung sa-rana prasara-na pe-nanggulan-gan bencana yang me-madai	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelengga-ra penanggu-langan bencana di daerah dan didukung sa-rana prasara-na pe-nanggulan-gan bencana yang me-madai

	Meningkatnya Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Meningkatkan Partisipasi Pentahelix penanggulangan Bencana (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media)	Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan koordinasi antar lintas OPD	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai	Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis kegiatan simulasi penanggulangan bencana, secara profesional terhadap berbagai program/kegiatan penanggulangan bencana	peningkatan komitmen para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP	Peningkatan Penilaian Opini BPK dan Nilai SAKIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Perubahan Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pada Perubahan ini ada nya penambahan nomenklatur sub kegiatan dan perubahan indikator sub kegiatan. Adapun Rencana Program Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Melaksanakan dalam 2 Program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota Medan.
2. Program Penanggulangan Bencana.

Untuk selengkapnya matrik program dan kegiatan adalah seperti tertera pada tabel dibawah ini;

Tabel. 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Sebelum Perubahan 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Ca- paian pada Ta- hun Awal Peren- ca- naan (Ta- hun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Loka si
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir peri- ode Renstra Perangkat Daerah		
							Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(23)
Terca painy a pen- gu- rang- an risiko benca na dan pe- nanga nan				Indeks Risi- ko Bencana	Poin	45,45	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0		

da- rurat yang cepat, tepat, efektif serta ter- waju dnya pem- uli- han wila- yah pasca benca na																				
	Menuru nnya risiko bencana , tersela mat- kannya sebanya k mung- kin korban			Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang mem- peroleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman		0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0	

	bencana serta ter-lak-sananya rehabilitasi dan rekon-struksi pasca bencana			bencana																	
		1.05.03		PROGRAM PE-NANGGULANGAN BENCANA				6.179.705.160		6.228.756.340		6.405.000.000		6.790.000.000		7.185.000.000		7.570.000.000		40.358.461.500	
				Persentase penanggu-langan bencana		0	100		100		100		100		100		100		600		
		1.05.03.2.01		Pelayanan In-formasi Rawan Bencana Ka-bupaten/Kota				928.581.400		623.805.000		330.000.000		360.000.000		390.000.000		420.000.000		3.052.386.400	
				Jumlah kegiatan layanan informasi rawan bencana Kabupat-en/Kota	Kegi-atan	0															

						yang diberi- kan																
		.05.03. 2.01.0 1		Penyusunan Kajian Risi- ko Bencana Kabupat- en/Kota					0		316.0 00.00 0		0		0		0		0		316.00 0.000	Ko ta Me da n
					Jumlah kajian risiko bencana Kabupat- en/Kota	Dok ume n	0															
		.05.03. 2.01.0 2		Sosialisasi, Komu- nikasi, In- formasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupat- en/Kota (Per Jenis Bencana)					928.5 81.40 0		307.8 05.00 0		330.00 0.000		360.00 0.000		390.00 0.000		420.00 0.000		2.736. 386.40 0	Ko ta Me da n

					Jumlah warga negara yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota	oran g	0	400		100		100		100		100		100		2400		
		.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				5.251.123.760		5.604.951.340		6.075.000.000		6.430.000.000		6.795.000.000		7.150.000.000		37.306.075.100		
					Jumlah kegiatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	0															
		.05.03.2.02.01		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				0		266.000.000		0		0		0		0		266.000.000		Kota Medan

				Kabupat- en/Kota																		
					Jumlah dokumen rencana penanggu- langan bencana Kabupat- en/Kota	Dok ume n	0															
		.05.03. 2.02.0 2		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupat- en/Kota				146.4 66.00 0		146.4 66.00 0		200.00 0.000		220.00 0.000		240.00 0.000		260.00 0.000		1.212. 932.00 0		Ko ta Me da n
					Jumlah orang yang dilatih pencegahan dan mitigasi bencana Kabupat- en/Kota	oran g	0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0		

		.05.03. 2.02.0 3		Pen- gendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsi- agaan ter- hadap Bencana Kabupat- en/Kota				595.3 66.20 0		180.1 00.00 0		200.00 0.000		220.00 0.000		240.00 0.000		260.00 0.000		1.695. 466.20 0	Ko ta Me da n
					Jumlah kegiatan pengendali- an operasi dan penye- diaan sara- na prasara- na kesiapsi- agaan ter- hadap bencana Kabupat- en/Kota	Kegi atan	0														
		.05.03. 2.02.0 4		Penyediaan Peralatan Perlin- dungan dan Kesiapsi- agaan ter-				0		246.4 43.00 0		300.00 0.000		320.00 0.000		340.00 0.000		360.00 0.000		1.566. 443.00 0	Ko ta Me da n

					hadap Bencana																	
					Jumlah peralatan perlin- dungan dan kesiapsi- agaan ter- hadap bencana yang terse- dia	unit	0			6		6		6		6		6		30		
		.05.03. 2.02.0 6			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiap- siagaan				146.4 66.00 0		146.2 66.00 0		200.00 0.000		220.00 0.000		240.00 0.000		260.00 0.000		1.212. 732.00 0	Ko ta Me da n
					Jumlah kawasan yang mendapat- kan pen- guatan ka- pasitas un- tuk pencegahan	Keca mata n	0	5		3		3		3		3		3		20		

						dan kesiap- siagaan																	
		.05.03. 2.02.0 7			Penanganan Pas- cabencana Kabupat- en/Kota				4.244. 292.0 60		4.367. 082.8 40		4.500. 000.00 0		4.700. 000.00 0		4.900. 000.00 0		5.100. 000.00 0		27.811 .374.9 00		Ko ta Me da n
					Jumlah kegiatan penanganan pasca bencana Kabupat- en/Kota	Kegi atan	0	1		1		1		1		1		1		6			
		.05.03. 2.02.0 8			Pengem- bangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupat- en/Kota				118.5 33.50 0		118.5 33.50 0		125.00 0.000		130.00 0.000		135.00 0.000		140.00 0.000		767.06 7.000		Ko ta Me da n
					Jumlah Tim Reaksi Ce- pat (TRC) bencana Kabupat- en/Kota	oran g	0	5		5		5		5		5		5		90			

					yang mendapat- kan pengem- bangan kapasitas																	
		.05.03. 2.02.0 9			Penyusunan Rencana Kontijensi			0		0		400.00 0.000		450.00 0.000		500.00 0.000		550.00 0.000		1.900. 000.00 0	Ko ta Me da n	
					Jumlah dokumen rencana kontijensi	Dok ume n	0															
		.05.03. 2.02.1 0			Gladi Kesiapsi- agaan ter- hadap Bencana			0		134.0 60.00 0		150.00 0.000		170.00 0.000		200.00 0.000		220.00 0.000		874.06 0.000	Ko ta Me da n	
					Jumlah orang yang mengikuti gladi kesiapsi- agaan ter- hadap bencana	oran g	0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		50 0			

				Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	45,45	100		100		100		100		100		100		600		
		.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.171.572.250		1.538.235.000		1.650.000.000		1.750.000.000		1.850.000.000		1.950.000.000		9.909.807.250	
				Persentase penanggulangan bencana		0	100		100		100		100		100		100		600		
		.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.171.572.250		1.538.235.000		1.650.000.000		1.750.000.000		1.850.000.000		1.950.000.000		9.909.807.250	
				Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi		0	100		100		100		100		100		100		600		

		.05.03. 2.03.0 2			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				549.9 75.00 0		595.3 66.20 0		650.00 0.000		700.00 0.000		750.00 0.000		800.00 0.000		4.045. 341.20 0	Kota Medan
					Persentase korban bencana yang dievakuasi dan ditangani dengan segera		100	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0		
		.05.03. 2.03.0 4			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				621.5 97.25 0		942.8 68.80 0		1.000. 000.00 0		1.050. 000.00 0		1.100. 000.00 0		1.150. 000.00 0		5.864. 466.05 0	Kota Medan
					Persentase pemenuhan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0		

				-		0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0		
	-			-		0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0		
		.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU- PATEN/KOTA					9.932. 116.0 00		9.894. 778.9 36		10.725 .382.6 43		11.471 .177.2 36		12.016 .586.0 38		12.778 .489.4 90		66.818 .530.3 43	
				Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerinta- han perangkat daerah	%	0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0		
		.05.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dae- rah					31.11 9.800		0		0		0		0		35.000 .000		66.119 .800	
				Persentase penyusunan Dokumen Perencanaa	%	0	10 0		0		0		0		0		10 0		20 0		

					n Perangkat Daerah tepat waktu (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKT, Lakip)																	
		.05.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah				31.119.800		0		0		0		0		35.000.000		66.119.800	Kota Medan	
					Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	1		0		0		0		0		1		2		
		.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.031.867.000		6.031.867.000		6.650.133.368		6.982.640.036		7.331.772.038		7.698.360.640		40.726.640.082		
					Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		0		100		100		100		100		100		600			

		.05.01. 2.02.0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.031. 867.0 00		6.031. 867.0 00		6.650. 133.36 8		6.982. 640.03 6		7.331. 772.03 8		7.698. 360.64 0		40.726 .640.0 82	Ko ta Me da n
					Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan	Ta- hun	0	1		1		1		1		1		1		6		
		.05.01. 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Dae- rah					82.14 0.000		174.2 54.40 0		183.05 9.350		188.08 7.350		193.34 1.700		198.83 3.800		1.019. 716.60 0	
					Persentase layanan administrasi kepega- waian perangkat daerah yang terpenuhi		0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0		
		.05.01. 2.05.0 2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka- pannya					82.14 0.000		82.14 0.000		90.559 .350		95.087 .350		99.841 .700		104.83 3.800		554.60 2.200	Ko ta Me da n

					Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengka- pannya	Ta- hun	0	1		1		1		1		1		1		6		
		.05.01. 2.05.0 9			Pendidikan dan Pelati- han Pegawai Berdasar- kan Tugas dan Fungsi				0		92.11 4.400		92.500 .000		93.000 .000		93.500 .000		94.000 .000		465.11 4.400	Ko ta Me da n
					Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelati- han	oran g	0	0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		50 0		
		.05.01. 2.06			Administrasi Umum Perangkat Dae- rah				645.5 15.60 0		347.0 70.47 6		389.58 9.650		425.06 9.500		460.72 2.950		498.55 9.150		2.766. 527.32 6	

					Ter-laksananya Administrasi Perangkat Daerah	Ta-hun	0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0		
		.05.01. 2.06.0 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.02 3.600		8.455. 600		12.153 .150		12.761 .200		13.399 .250		14.069 .250		71.862 .050	Ko ta Me da n
					Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bu- lan	0	12		12		12		12		12		12		72		
		.05.01. 2.06.0 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.61 8.900		19.88 1.200		20.000 .000		22.000 .000		24.000 .000		28.000 .000		134.50 0.100	Ko ta Me da n
					Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	Ta- hun	0	1		1		1		1		1		1		6		

		.05.01. 2.06.0 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.98 1.600		42.44 2.176		43.333 .850		45.500 .550		47.775 .550		50.164 .350		279.19 8.076	Ko ta Me da n
					Tersedianya bahan logis- tik kantor selama 1 tahun	Ta- hun	0	1		1		1		1		1		1		6		
		.05.01. 2.06.0 5			Penyediaan Barang Ce- takan dan Pengan- daan				12.79 1.500		7.291. 500		14.102 .650		14.807 .750		15.548 .150		16.325 .550		80.867 .100	Ko ta Me da n
					Jumlah Barang Ce- takan dan Pengan- daan	Ta- hun	0															
		.05.01. 2.06.0 9			Penyeleng- garaan Rapat Koordinasi dan Kon- sultasi SKPD				551.1 00.00 0		269.0 00.00 0		300.00 0.000		330.00 0.000		360.00 0.000		390.00 0.000		2.200. 100.00 0	Ko ta Me da n

					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	Kali	0	30		30		30		30		30		30		180		
		.05.01. 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					77.04 7.800		95.17 9.400		50.000 .000		132.00 0.000		60.000 .000		110.00 0.000		524.22 7.200	
					Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		0	100		100		100		100		100		100		600		
		.05.01. 2.07.0 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					48.04 7.800		95.17 9.400		50.000 .000		100.00 0.000		60.000 .000		110.00 0.000		463.22 7.200	Kota Medan
					Jenis pengadaan peralatan dan mesin	Jenis	0	3		4		3		3		3		3		18		

					lainnya																	
		.05.01. 2.07.1 0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.00 0.000		0		0		32.000 .000		0		0		61.000 .000	Ko ta Me da n	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	0	10 0		0		0		10 0		0		0		2			
		.05.01. 2.08		Penyediaan Jasa Penun- jang Urusan Pemerintahan Daerah				2.464. 946.4 00		2.802. 242.6 60		2.984. 753.40 0		3.225. 641.10 0		3.427. 873.15 0		3.669. 466.80 0		18.574 .923.5 10		
				Persentase layanan penyediaan jasa penun- jang urusan yang ter- penuhi		0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0			

		.05.01. 2.08.0 2			Penyediaan Jasa Komu- nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				124.9 46.40 0		124.9 46.40 0		137.75 3.400		144.64 1.100		151.87 3.150		159.46 6.800		843.62 7.250	Ko ta Me da n
					Jenis penyediaan jasa komu- nikasi, sumber daya air dan listrik	Jeni s	0	4		4		4		4		4		4		24		
		.05.01. 2.08.0 4			Penyediaan Jasa Pela- yanan Umum Kan- tor				2.340. 000.0 00		2.677. 296.2 60		2.847. 000.00 0		3.081. 000.00 0		3.276. 000.00 0		3.510. 000.00 0		17.731 .296.2 60	Ko ta Me da n
					Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	oran g	0	65		65		65		65		65		65		39 0		
					Jumlah pelaksa- naan senam kesegaran jasmani	Kali	0		0	40	80.00 0.000	40	82.000 .000	40	84.000 .000	40	86.000 .000	40	88.000 .000	20 0	420.00 0.000	

		.05.01. 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun- jang Urusan Pemerintahan Daerah				421.3 65.00 0		444.1 65.00 0		467.84 6.875		517.73 9.250		542.87 6.200		568.26 9.100		2.962. 261.42 5	
					Persentase capaian barang milik dae- rah penun- jang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	%	0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		60 0	
		.05.01. 2.09.0 2		Penyediaan Jasa Pemeli- haraan, Biaya Pemeli- haraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapan- gan				242.6 15.00 0		295.4 15.00 0		310.00 0.000		350.00 0.000		365.00 0.000		380.00 0.000		1.943. 030.00 0	Ko ta Me da n

					Tersedianya Jasa Pemeli- haraan, Biaya Pemeli- haraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapan- gan	%	0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0			
					Pemeli- haraan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				88.75 0.000	90.00 0.000		97.846 .875		102.73 9.250		107.87 6.200		113.26 9.100		600.48 1.425	
					Jumlah pemeli- haraan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kan- tor atau bangunan	Ta- hun	0	1		1		1		1		1		1		1	

					lainnya																	
				Pemeli- haraan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.00 0.000	58.75 0.000	60.000 .000	65.000 .000	70.000 .000	75.000 .000	418.75 0.000								
				Jumlah Ter- laksananya Pemeli- haraan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	60 0									
		.05.01. 2.13		Penataan Or- ganisasi				178.1 14.40 0	0	0	0	0	0	178.11 4.400								
				Persentase		0	10	178.1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	60	178.11		

					Cakupan Penataan Organisasi			0	14.40 0	0		0		0		0		0		0	4.400	
		.05.01. 2.13.0 3			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				178.1 14.40 0		0		0		0		0		0		178.11 4.400	Ko ta Me da n
					Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Ta- hun	0		178.1 14.40 0		0		0		0		0		0		178.11 4.400	

Tabel. 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Sesudah Perubahan 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(23)
Pengurangan Risiko Bencana dan Penanganan Darurat yang Cepat, Tepat, Efektif Serta Terwujudnya				Indeks Risiko Bencana	Indeks	na	92.84		91.92		91.01		90.01		89.20		88.31		88.31		

Pem- ulihan Wila- yah Pasca Benca na																					
	Terselamat kannya Sebanyak mungkin Korban Bencana, Ter- penuhinya Kebutuhan Korban serta Ter- laksananya Pemulihan Pasca Bencana			Persen- tase penyela- matan dan evakuasi korban bencana yang menerima bantuan Pemenu- han Kebu- tuhan Dasar	%	100	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		

		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.671.572.250		2.611.805.000		3.376.070.000		2.471.074.150		3.058.221.992		2.787.622.212		16.976.365.604	
				Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					2.671.572.250		2.611.805.000		3.376.070.000		2.471.074.150		3.058.221.992		2.787.622.212		16.976.365.604	Kota Medan
				Jumlah Korban yang Berhasil Dievakuasi dan atau Diberikan Bantuan	orang	Na	88596		53451		53400		53300		53200		53100		53100		

		1.05.03 .2.03.0 002			Respon Cepat Da- rurat Bencana Kabupat- en/Kota				549.9 75.00 0		1.548. 126.2 00		1.358. 376.0 00		1.358. 376.0 00		1.371. 959.7 60		1.385. 679.3 58		7.572. 492.3 18	Ko ta Me da n
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetap- kan Paling Lama 1x24 Jam berdasar- kan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Doku men	1	1		1		1		1		1		1		1		
		1.05.03 .2.03.0 007			Penyusu- nan Rencana Operasi Kedarurata n Bencana Kabupat- en/Kota				0		0		0		0		298.2 00.00 0		0		298.2 00.00 0	Ko ta Me da n

					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	1	0		0		0		0		1		0		1		
		1.05.03 .2.03.0 008			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		264.237.100		266.879.471		531.116.571	Kota Medan
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	orang	Na	0		0		0		0		124		124		124		

		1.05.03 .2.03.0 009			Penye- diaan Logistik Penyela- matan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupat- en/Kota				2.121. 597.2 50		1.063. 678.8 00		2.017. 694.0 00		1.112. 698.1 50		1.123. 825.1 32		1.135. 063.3 83		8.574. 556.7 15	Ko ta Me da n
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapat kan Dis- tribusi Logistik Penyela- matan dan Evakuasi Korban Bencana	oran g	Na	24 45 65		24 45 65		24 45 65		24 45 65		24 45 65		24 45 65		24 45 65		

	Meningkatnya Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Persentase Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Tersampaikan ke Masyarakat	%	Na	34.87		45.94		60.94		86.34		90.9		100		100		
		1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				6.179.705.160		8.074.278.808		23.359.451.459		3.043.874.610		3.799.041.608		3.837.032.021		48.293.383.666	
				Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				928.581.400		813.005.000		231.587.635		334.999.260		338.349.253		341.732.745		2.988.255.293	

					Jumlah Penduduk di Kawasan Bencana dengan Rasio Tinggi yang Memperoleh Informasi	oran g	Na	20005		655675		660000		670000		680000		690000		690000		
		1.05.03 .2.01.0 003			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0		348.200.000		0		0		0		0		348.200.000	Kota Medan
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	0		1		0		0		0		0		1		

		1.05.03 .2.01.0 004		Sosialisasi, Komu- nikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Ra- wan Bencana Kabupat- en/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					928.5 81.40 0		464.8 05.00 0		231.5 87.63 5		334.9 99.26 0		338.3 49.25 3		341.7 32.74 5		2.640. 055.2 93	Ko ta Me da n
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	-----------------------	---------------------------

					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupat- en/Kota yang mem- peroleh sosial- isasi, komu- nikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis an- caman bencana yang ada di kawa- san tem- pat ting- galnya selama 1 (satu) tahun	oran g	100	40 0		11 00		10 00		10 00		10 00		10 00		10 00		
--	--	--	--	--	---	-----------	-----	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--

		1.05.03 .2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsi- agaan Ter- hadap Bencana					1.006. 831.7 00		4.682. 708.1 80		20.36 0.642. 264		2.311. 038.3 80		2.462. 477.0 15		2.487. 101.7 83		33.31 0.799. 322	
					Jumlah orang yang mendapat Pelatihan Mitigasi Bencana	oran g	Na	17 00 6		39 02 52		39 07 52		39 12 52		39 17 52		39 22 52		39 22 52		
		1.05.03 .2.02.0 006		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencega- han dan Kesiapsi- agaan					2.671. 572.2 50		146.2 66.00 0		0		83.72 0.600		84.55 7.806		85.40 3.384		546.4 13.79 0	Ko ta Me da n

					Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Na	3		3		0		3		3		3		3			
		1.05.03 .2.02.0 008			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				118.5 33.50 0		377.9 51.00 0		264.2 37.10 0		302.9 60.96 0		305.9 90.57 0		309.0 50.47 5		1.678. 723.6 05		Kota Medan
					Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	orang	65	65		65		85		85		85		85		85			

		1.05.03 .2.02.0 009		Penyusu- nan Rencana Kontijensi				0		0		300.0 00.00 0		359.2 50.00 0		362.8 42.50 0		366.4 70.92 5		1.388. 563.4 25	Ko ta Me da n
					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjen si yang Dilegal- isasi	Doku men	Na	0		0	1		1		1		1		1		
		1.05.03 .2.02.0 010		Gladi Kesiapsi- agaan Ter- hadap Bencana				0		134.0 60.00 0		84.43 6.710		255.3 36.09 0		257.8 89.45 1		260.4 68.34 5		992.1 90.59 6	Ko ta Me da n

					Jumlah Aparatur dan War- ga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsi- agaan	oran g	100	0		10 0		10 0		10 00		10 00		10 00		10 00		
		1.05.03 .2.02.0 012		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					0		0		0		0		128.3 28.25 0		129.6 11.53 3		257.9 39.78 3	Ko ta Me da n
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kelu arga	Na	0			0		0		0		50		50		50		

		1.05.03 .2.02.0 013		Pengel- olaan Risi- ko Bencana Kabupat- en/Kota				0		0		18.27 9.207. 400		0		0		0		18.27 9.207. 400	Ko ta Me da n
					Jumlah kegiatan penyelesai an akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupat- en/Kota yang ter- tangani	Kegia tan	Na	0		0		1		0		0		0		1	
		1.05.03 .2.02.0 014		Penyusu- nan Rencana Penangu- langan Bencana Kabupat- en/Kota				0		298.2 00.00 0		0		0		0		0		298.2 00.00 0	Ko ta Me da n

					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	Na	0		1		0		0		0		0		1		
		1.05.03 .2.02.0 015			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				26715 72250		2.448. 646.7 20		616.6 56.52 8		304.9 24.55 0		307.9 73.79 6		311.0 53.53 3		3.989. 255.1 27	Kota Medan

					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	unit	Na	0		429		333		347		300		300		300			
		1.05.03 .2.02.0 016			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				146.466.000		146.466.000		128.328.250		250.487.720		252.992.597		255.522.523		1.180.263.090		Kota Medan

					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupat- en/Kota yang mengikuti pelatihan pencega- han dan mitigasi bencana	Ka- wa- san	na	3		3		3		3		3		3		3			
		1.05.03 .2.02.0 017		Pengen- dalian Operasi dan Penye- diaan Sa- rana Prasarana Kesiapsi- agaan Ter- hadap Bencana Kabupat- en/Kota					595.3 66.20 0		1.131. 118.4 60		687.7 76.27 6		754.3 58.46 0		761.9 02.04 5		769.5 21.06 5		4.700. 042.5 06		Ko ta Me da n

					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	1	1		1		1		1		1		1		1		
		1.05.03 .2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				4.244. 292.0 60		2.578. 565.6 28		2.767. 221.5 60		397.8 36.97 0		998.2 15.34 0		1.008. 197.4 93		11.99 4.329. 051		

					Jumlah Kelurahan yang Mendapat Pelatihan Tanggap Bencana	Ke-lu-ra-han	Na	151		151		151		151		151		151		151		
		1.05.03 .2.04.0 002		Penguatan Kelem-bagaan Bencana Kabupat-en/Kota				0		0		0		0		298.2 00.00 0		301.1 82.00 0		599.3 82.00 0		Ko ta Me da n
					Jumlah Dokumen Tata Kel-ola Kelem-bagaan Bencana Daerah	Doku men	Na	0		0		0		0	1		1		1			
		1.05.03 .2.04.0 010		Koordinasi pe-nanganan Pa-cabencana Kabupat-en/Kota				4.244. 292.0 60		2.578. 565.6 28		2.767. 221.5 60		397.8 36.97 0		401.8 15.34 0		405.8 33.49 3		10.79 5.565. 051		Ko ta Me da n

					Jumlah penyelesaian kegiatan pas-cabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pas-cabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1		
		1.05.03 .2.04.0 013			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pas-cabencana (JITU-PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pas-cabencana (R3P) Kab/Kota																	Kota Medan

					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pas-cabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pas-cabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	0		0		0		0		1		1		1		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Nilai Siskip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	Na	57.6		63.15		63.25		63.35		63.45		63.55		63.55		

		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU- PATEN/KOTA					10.18 9.412. 260		11.62 7.082. 308		13.36 2.327. 671		13.76 2.890. 249		14.35 9.859. 824		14.53 4.889. 420		77.83 6.461. 732	
				Persen- tase Dokumen Perencana an, Keu- angan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Per- sen	Na	10 0	6.062. 986.8 00	10 0	6.151. 880.8 71	10 0	7.268. 385.7 48	10 0	7.429. 698.0 10	10 0	7.503. 994.9 90	10 0	7.610. 465.9 38	10 0	42.02 7.412. 357	
				Persen- tase Sara- na dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Per- sen	Na	10 0	498.4 12.80 0	10 0	1.573. 104.8 46	10 0	1.555. 292.9 19	10 0	1.114. 072.1 75	10 0	1.584. 553.5 68	10 0	1.600. 399.1 04	10 0	7.925. 835.4 12	
				Survey Kepuasan Internal	Nilai (Pred ikat)	na	57. 6	3.628. 012.6 60	63, 15	3.902. 096.5 91	63, 25	4.538. 649.0 04	63, 35	5.219. 120.0 64	63, 45	5.271. 311.2 66	63, 55	5.324. 024.3 78	63. 55	27.88 3.213. 963	

		1.05.01 .2.01		Perencanaan, Pengang- garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.11 9.800		0		0		0		0		31.43 0.998		62.55 0.798	
				Persen- tase Dokumen Perencana an, Pengang- garan dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat wak- tu.	Per- sen	Na	10 0		0		0		0		0		10 0		10 0	62.55 0.798	
		1.05.01 .2.01.0 001		Penyusu- nan Dokumen Perencana an Perangkat Daerah				31.11 9.800										31.43 0.998		62.55 0.798	Ko ta Me da n
				Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Doku men	Na	1		0		0		0		0		1		1		

		1.05.01 .2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.031. 867.0 00		6.151. 880.8 71		7.268. 385.7 48		7.429. 698.0 10		7.503. 994.9 90		7.579. 034.9 40		41.96 4.861. 559	
					Persen- tase Dokumen Admin- istrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat wak- tu.	Per- sen	100	10 0	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		
		1.05.01 .2.02.0 001		Penye- diaan Gaji dan Tun- jangan ASN				6.031. 867.0 00	10 0	6.151. 880.8 71	10 0	7.268. 385.7 48	10 0	7.429. 698.0 10	10 0	7.503. 994.9 90	10 0	7.579. 034.9 40	10 0	41.96 4.861. 559	Ko ta Me da n
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjan- gan ASN	Oran g/bul an	30	30		32		35		36		36		36		36	
		1.05.01 .2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				77.04 7.800		386.5 26.84 6		505.8 80.91 9		32.11 3.175		491.7 74.97 8		496.6 92.72 8		1.990. 036.4 46	

					Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		
		1.05.01 .2.07.0 005			Pengadaan Mebel				0		0		18.97 5.000		0		0		0		18.97 5.000	Kota Medan
					Jumlah Paket Mebel yang Dise- diakan	unit	Na	0		0		51		0		0		0		51		
		1.05.01 .2.07.0 006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.04 7.800		386.5 26.84 6		486.9 05.91 9		32.11 3.175		491.7 74.97 8		496.6 92.72 8		1.942. 061.4 46	Kota Medan
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise- diakan	unit	39	39		39		39		39		39		39		39		

		1.05.01 .2.07.0 010		Pengadaan Sarana dan Prasa- rana Ge- dung Kan- tor atau Bangunan Lainnya				29.00 0.000		0		0		0		0		0		29.00 0.000	Ko ta Me da n
					Jumlah Unit Sa- rana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise- diakan	unit	Na	39		0		0		0		0		0		39	
		1.05.01 .2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				421.3 65.00 0		1.186. 578.0 00		1.049. 412.0 00		1.081. 959.0 00		1.092. 778.5 90		1.103. 706.3 76		5.935. 798.9 66	

					Persen- tase Ba- rang Milik Daerah yang di- pelihara sesuai dokumen perencana an	Per- sen	100	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0			
		1.05.01 .2.09.0 002		Penye- diaan Jasa Pemeli- haraan, Biaya Pemeli- haraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion- al atau Lapangan				242.6 15.00 0		911.5 78.00 0		728.7 50.00 0		803.2 20.00 0		811.2 52.20 0		819.3 64.72 2		4.316. 779.9 22		Ko ta Me da n	
					Jumlah Ken- daraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Di- pelihara dan dibayar- kan Pajak dan Per-	unit	Na	26		26		26		26		26		26		26			

					izinannya																	
		1.05.01 .2.09.0 006			Pemeli- haraan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		78.82 2.000		79.61 0.220		80.40 6.322		238.8 38.54 2	Ko ta Me da n
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di- pelihara	unit	Na	0		0		0		53		53		53		53		
		1.05.01 .2.09.0 009			Pemeli- haraan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.00 0.000		200.0 00.00 0		194.6 50.00 0		199.9 17.00 0		201.9 16.17 0		203.9 35.33 2		1.090. 418.5 02	Ko ta Me da n

					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1		1		1		1		1		1		1		
		1.05.01 .2.09.0 010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88.75 0.000		75.00 0.000		126.0 12.00 0		0		0		0		289.7 62.00 0	Ko ta Me da n
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Na	53		53		53		0		0		0		53		
		1.05.01 .2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat				82.14 0.000		398.8 22.70 0		195.2 48.46 0		383.8 84.46 0		387.7 23.30 5		391.6 00.53 8		1.839. 419.4 63	

				Daerah																	
					Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Per- sen	100	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
		1.05.01 .2.05.0 002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				82.14 0.000		306.7 08.30 0		100.0 00.00 0		249.9 36.00 0		252.4 35.36 0		254.9 59.71 4		1.246. 179.3 74	Ko ta Me da n
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1		1		1		1		1		1		1		
		1.05.01 .2.05.0 009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		92.11 4.400		95.24 8.460		133.9 48.46 0		135.2 87.94 5		136.6 40.82 4		593.2 40.08 9	Ko ta Me da n

					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	Na	0		100		100		124		124		124		124		
		1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					645.515.600		619.854.091		659.213.844		823.106.244		831.337.307		839.650.680		4.418.677.766	
					Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		
		1.05.01.2.06.001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					11.023.600		13.159.675		10.313.660		10.442.720		10.547.147		10.652.619		66.139.421	Kota Medan

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Dise- diakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		1		
		1.05.01 .2.06.0 003			Penye- diaan Peralatan Rumah Tangga				20.61 8.900		19.88 1.200		29.78 8.853		26.73 0.525		26.99 7.830		27.26 7.809		151.2 85.11 7	Ko ta Me da n
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dise- diakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		1		
		1.05.01 .2.06.0 004			Penye- diaan Ba- han Logis- tik Kantor				49.98 1.600		89.88 1.716		82.85 9.623		78.76 5.273		79.55 2.926		80.34 8.455		461.3 89.59 3	Ko ta Me da n

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise- diakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		1			
		1.05.01 .2.06.0 005			Penye- diaan Ba- rang Ce- takan dan Pengan- daan				12.79 1.500		7.291. 500		19.79 3.708		52.13 9.266		52.66 0.659		53.18 7.265		197.8 63.89 8		Ko ta Me da n
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng- gandaan yang Dise- diakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		1			
		1.05.01 .2.06.0 009			Penyeleng- garaan Rapat Koordinasi dan Kon- sultasi SKPD				551.1 00.00 0		489.6 40.00 0		516.4 58.00 0		655.0 28.46 0		661.5 78.74 5		668.1 94.53 2		3.541. 999.7 37		Ko ta Me da n

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Na	4		4		4		4		4		4		4		
		1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.722.242.660		2.883.419.800		3.684.186.700		4.012.129.360		4.052.250.654		4.092.773.160		21.447.002.334	
					Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	2.722.242.660	100	2.883.419.800	100	3.684.186.700	100	4.012.129.360	100	4.052.250.654	100	4.092.773.160	100	21.447.002.334	
		1.05.01.2.08.002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					124.946.400		165.816.700		186.528.800		198.929.000		200.918.290		202.927.473		1.080.066.663	Kota Medan

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise-	laporan	Na	4		4		4		4		4		4		4		
		1.05.01 .2.08.0 004			Penye- diaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.597. 296.2 60		2.717. 603.1 00		3.497. 657.9 00		3.813. 200.3 60		3.851. 332.3 64		3.889. 845.6 87		20.36 6.935. 671	Ko ta Me da n
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise-	laporan	4	4		4		4		4		4		4		4		
		1.05.01 .2.13			Penataan Organisasi				178.1 14.40 0		0		0		0		0		0		178.1 14.40 0	

					Persen- tase cakupan penataan organisasi	Per- sen	100	10 0	178.1 14.40 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 0	178.1 14.40 0	
		1.05.01 .2.13.0 003		Pening- katan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					178.1 14.40 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		178.1 14.40 0	Ko ta Me da n
					Jumlah Dokumen Pening- katan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Doku men	Na	1		0		0		0		0		0		1		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh BPBD. Dalam Rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. BPBD menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Perubahan Pada Indikator Kinerja Utama Renstra adanya penambahan 1 Indikator baru yaitu Nilai SAKIP, terlampir pada tabel dibawah ini ;

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun 2021- 2026						Kondisi kinerja Pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	na	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Tesampaikan ke Masyarakat	na	34,87	45,94	100	100	100	100	100
3	Nilai SAKIP	na	57,6	63,15	63,25	63,35	63,5	63,55	63,55

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah BPBD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf BPBD Kota Medan. Perubahan Rencana Strategis OPD BPBD Kota Medan Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPBD Kota Medan. Untuk mewujudkan visi, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Perubahan Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan BPBD Kota Medan. Perubahan Renstra BPBD Kota Medan periode 2021–2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di BPBD Kota Medan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja, dan kinerja pegawai.